

**PENGARUH BELANJA PEMERINTAH DAERAH TERHADAP
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI KABUPATEN
ENREKANG PROVINSI SULAWESI SELATAN**

SKRIPSI

Oleh
SISKA PURNAMA SARI
NIM 105710199314



**ILMU EKONOMI DAN STUDY PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2019**

**PENGARUH BELANJA PEMERINTAH DAERAH TERHADAP INDEKS
PEMBANGUNAN MANUSIA DI KABUPATEN ENREKANG PROVINSI
SULAWESI SELATAN**

SKRIPSI

**SISKA PURNAMA SARI
NIM 105710199314**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Ekonomi
Pada Jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar**

**JURUSAN ILMU EKONOMI STUDI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2019

PERSEMBAHAN

Karya Ilmiah yang berjudul Pengaruh Belanja Pemerintah Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan ini kupersembahkan kepada:

- Kedua Orang Tuaku, Ayahanda Hamzah Rangin dan Ibunda Ramlah yang selama ini tak pernah Lelah melimpahkan kasih sayang yang tak terhingga, memberi nasehat-nasehat yang sangat berharga dan support dikalah saya mulai lemah menghadapi dunia. Maaf belum bisa membalas segala pengorbanan kalian, belum bisa membuat kalian bangga,dan belum bisa membuat kalian bahagia. Semoga kalian terus diberikan kesehatan, kebahagiaan sepanjang usia dan selalu dalam lindungan-Nya Aamiin.
- Kepada saudara-saudaraku keluarga besar MallaRangin terima kasih banyak atas Doa dan supportnya dalam pengerjaan skripsi ini.
- Kepada sahabat-sahabat & teman-teman seperjuangan terima kasih atas kebersamaanya.

MOTTO HIDUP

Cepat tak selalu berarti Tepat,
Lambat bukan berarti Terlambat,
Ini tentang menikmati setiap Proses,
Bukan tentang siapa cepat dia dapat,
Bukan pula tentang siapa Lambat dia Tamat.



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No.259 gedung iqra Lt.7 Telp. (0411) 860132 Makassar

LEMBAR PERSETUJUAN

Judul Penelitian : **Pengaruh Belanja Pemerintah Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan.**

Nama Mahasiswa : Siska Pumama Sari
No. Stambuk : 105710199314
Program Studi : Ilmu Ekonomi & Studi Pembangunan
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Telah diuji dan di seminarkan Pada Tanggal 9 Februari 2019

Makassar, 9 Februari 2019

Menyetujui

Pembimbing I,

Dr. Akhmad, M.Si
NIDN: 0031126521

Pembimbing II,

Samsul Rizal, SE.,MM
NIDN: 0907028401

Mengetahui

Dekan,

Ismail Rasulong, SE.,MM
NBM: 903 078

Ketua Program Studi IESP

Hj. Naidah, SE.,M.Si
NBM: 710561



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No.259 gedung iqra Lt.7 Telp. (0411) 860132 Makassar



LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi atas nama **SISKA PURNAMA SARI, NIM : 105710199314**, diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor :0001/SK-Y/60201/091004/2019 M, Tanggal 4 Jumadil Akhir 1440 H/ 9 Februari 2019 M, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi** pada Program Studi Ilmu Ekonomi & Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 4 Jumadil Akhir 1440 H
9 Februari 2019 M

PANITIA UJIAN

1. Pengawas Umum: Prof.Dr.H.Abdul Rahman Rahim, SE.,MM (
Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar
 2. Ketua : Ismail Rasullong, SE.,MM
Dekan Fakultas Ekonomi & Bisnis
 3. Sekretaris : Dr. Agus Salim H R, SE.,MM
WD I Fakultas Ekonomi & Bisnis
 4. Penguji : 1. Naidah, SE.,M.Si
2. Asdar, SE.,M.Si
3. Drs. Sanusi AM, SE.,M.Si
4. Dr.Hj. Arniati, SE.,M.Pd
- 

Disahkan oleh,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar



Ismail Rasullong, SE.,MM
NBM: 903 078



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No.259 gedung iqra Lt.7 Telp. (0411) 860132 Makassar



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siska Purnama Sari
Stambuk : 105710199314
Program Study : Ilmu Ekonomi Study Pembangunan
Dengan Judul : "Pengaruh Belanja Pemerintah Daerah Terhadap Indeks
Pembangunan Manusia di Kabupaten Enrekang
Provinsi Sulawesi Selatan"

Dengan ini menyatakan bahwa:

"Skripsi yang saya ajukan di depan Tim Penguji adalah ASLI karya saya sendiri, bukan hasil jiplakan dan dibuat oleh siapa pun."

Damikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya berani menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 9 Februari 2019
Yang membuat pernyataan



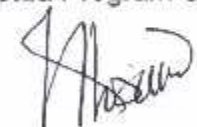
Siska Purnama Sari

Diketahui oleh:

Dekan,

Smail Rasulong, SE.,MM
NBM: 903 078

Ketua Program Studi IESP


Hj. Naidah, SE.,M.Si
NBM: 710561

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hamba-Nya. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulis skripsi yang berjudul “Pengaruh Belanja Pemerintah Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan”.

Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewah dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua penulis bapak Hamzah Rangin dan ibu Ramlah yang senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan doa tulus tak pamrih. Dan saudara-saudaraku tercinta yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat hingga akhir studi ini. Dan seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, dukungan dan doa restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadan dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan di akhirat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula

penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada:

1. Bapak Prof.Dr.H. Abd Rahman Rahim, SE.,MM Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar
2. Bapak Ismail Rasullong, SE.,MM, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Ibu Hj. Naidah, SE.,M.Si, selaku ketua Program Studi Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak Dr. Akhmad, M.Si, selaku Pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga Skripsi selesai dengan baik.
5. Bapak Samsul Rizal, SE.,MM, selaku Pembimbing II yang telah berkenan membantu selama dalam penyusunan skripsi hingga ujian skripsi.
6. Bapak/Ibu dan asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal Lelah banyak menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah
7. Segenap Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
8. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Angkatan 2014 yang selalu belajar Bersama yang tiada sedikit bantuannya dan dorongannya dalam aktivitas studi penulis.
9. Terima kasih teruntuk semua saudara-saudaraku di [F.K], Rekanku Rizqo Maharya, kerabat-kerabatku, sahabat dan semua yang tidak bisa penulis tulis

satu persatu yang telah memberikan semangat, kesabaran, motivasi, dan dukungannya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini.

Akhirnya, sungguh penulis sangat menyadari bahwa Skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan oleh karena itu, kepada semua pihak utamanya para pembaca yang budiman, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritiknya demi kesempurnaan Skripsi ini.

Mudah-mudahan Skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada Almamater Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

Billahi fii Sabilil Haq, Fastabiqul Khairat, Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Makassar, Februari 2019

Siska Purnama Sari

.ABSTRAK

SISKA PURNAMA SARI, Tahun 2019 Pengaruh Belanja Pemerintah Daerah Terhadap Indeks Pembangunan di Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan, Skripsi Program Studi Ilmu Ekonomi & Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Pembimbing I Akhmad dan Pembimbing II Samsul Rizal.

Penelitian ini bertujuan menganalisis seberapa pengaruh belanja pemerintah daerah dalam urusan belanja pendidikan, belanja kesehatan dan belanja ekonomi terhadap indeks pembangunan manusia Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan. Data yang digunakan adalah data *Time Series* selama periode tahun 2007-2016. Data tersebut diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Enrekang dan beberapa instansi terkait. Data kemudian dianalisis dengan menggunakan metode regresi berganda. Perhitungan data dalam penelitian ini menggunakan program SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variable Belanja Pendidikan (X_1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Kabupaten Enrekang. Sedangkan variabel belanja Kesehatan (X_2) dan belanja ekonomi (X_3) berpengaruh positif tapi tidak nyata terhadap indeks pembangunan manusia di Kabupaten Enrekang.

Kata Kunci: *Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan, Belanja Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)*

ABSTRACT

SISKA PURNAMA SARI, 2019 *Effect of Regional Government Expenditures on Development Index in Enrekang District, South Sulawesi Province, Thesis Study Program in Economics & Development Studies Faculty of Economics and Business, University of Muhammadiyah Makassar. Supervised by Advisor I Akhmad and Advisor II Samsul Rizal.*

This study aims to analyze how the influence of regional government spending in matters of education spending, health expenditure and economic expenditure on the human development index of Enrekang Regency, South Sulawesi Province. The data used is the Time Series data during the period 2007-2016. The data was obtained from the Enrekang Regency Central Bureau of Statistics and several related agencies. Data is then analyzed using multiple regression methods. Calculation of data in this study using the SPSS program. The results showed that the variable Education Expenditure (X1) has a positive and significant effect on the human development index in Enrekang District. While health expenditure (X2) and economic expenditure (X3) had a positive but not significant effect on the human development index in Enrekang District.

Keywords: *Education Expenditures, Health Expenditures, Economic Expenditures and Human Development Index (HDI)*

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
SURAT PERNYATAAN.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK BAHASA INDONESIA	x
ABSTRACT.....	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABLE.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian	4
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	6
A. Tinjauan Pustaka.....	6
1. Pembangunan Manusia.....	6
2. Indeks Pembangunan Manusia	8
a. Metode Perhitungan Indeks Pembanguna Manusia & Komponennya	10

3. Belanja Pemerintah	13
4. Belanja Pemerintah Di Sektor Pendidikan	14
5. Belanja Pemerintah Di Sektor Kesehatan	16
6. Belanja Pemerintah Di Sektor Ekonomi	17
7. Hubungan Belanja Pemerintah (Pendidikan, Kesehatan & Ekonomi) terhadap Indeks Pembangunan Manusia.....	18
B. Tinjauan Empiris.....	22
C. Kerangka Konsep.....	25
D. Hipotesis	27
BAB III. Metodologi Penelitian	28
A. Lokasi Penelitian	28
B. Jenis & Sumber Data.....	28
C. Metode Analisis Data.....	28
D. Uji Hasil.....	29
1. Analisis Koefisien Determinasi (R^2).....	29
2. Uji F Statik	30
3. Uji t Statik	30
E. Defenisi Operasional Variabel.....	31
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33
A. Gambaran Umum Daerah Penelitian.....	33
1. Kondisi Geografis Daerah Penelitian.....	33
2. Perkembangan Geografis Daerah Penelitian.....	34
3. Perkembangan Perekonomian Kabupaten Enrekang Periode 2007-2016	34
B. Deskripsi Variable Penelitian	36

1. Perkembangan Komponen IPM Kabupaten Enrekang.....	36
a. Angka Harapan Hidup	38
b. Rata-Rata Lama Sekolah	40
c. Indikator Daya Beli.....	42
2. Perkembangan Belanja Pemerintah Daerah Bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Ekonomi Kabupaten Enrekang	44
a. Perkembangan Belanja Pendidikan	45
b. perkembangan Belanja Kesehatan.....	46
c. Perkembangan Belanja Ekonomi.....	47
C. Hasil Analisis	49
1. Hasil Uji.....	49
a. Koefisien Determinasi (R^2).....	49
b. Pengujian Signifikasi secara parsial (Uji t)	50
c. Pengujian Signifikasi secara simultan (uji F)	51
D. Analisis Hasil	52
E. Pembahasan.....	54
1. Pengaruh Belanja Pendidikan terhadap IPM	55
2. Pengaruh Belanja Kesehatan terhadap IPM.....	56
3. Pengaruh Belanja Ekonomi terhadap IPM	58
BAB V. PENUTUP	60
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA.....	62

DAFTAR TABLE

Nomor	Judul	Halaman
Table 4.1	Jumlah Penduduk Kabupaten Enrekang Tahun 2007-20016	34
Table 4.2	Laju Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 lapangan Usahan Kabupaten Enrekang 2007-2016	35
Table 4.3	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Enrekang Tahun 2007-2016	37
Table 4.4	Indeks Angka Harapan Hidup Kabupaten Enrekang Tahun 2007-2016	39
Table 4.5	Indeks Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Enrekang Tahun 2007-2016	41
Table 4.6	Indeks Daya Beli Kabupaten Enrekang Tahun 2007-2016	43
Table 4.7	Perkembangan Belanja Bidang Pendidikan Kabupaten Enrekang Tahun 2007-2016	45
Table 4.8	Perkembangan Belanja Bidang Kesehatan Kabupaten Enrekang Tahun 2007-2016	47
Table 4.9	Perkembangan Belanja Bidang Ekonomi Kabupaten Enrekang Tahun 2007-2016	48
Table 4.10	Uji Koefisien Determinasi (R^2)	49

Table 4.11 Uji signifikansi t ($\alpha=0.05$) untuk pengaruh X1,X2 dan X3 terhadap Y	51
Table 4.12 uji signifikasi F ($\alpha=0,05$) untuk pengaruh X1, X2, Dan X3 terhadap Y	52
Table 4.13 Pengaruh Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan dan Belanja Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia	53

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1: Kerangka Konsep	26
Gambar 4.1 Kerangka Konsep dengan Hasil Estimasi	54

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Hasil estimasi uji Koefisien Determinasi (R^2)	63
2. Hasil estimasi uji t	63
3. Hasil estimasi uji F	64
4. Rekapitulasi Variable X1, X2, dan X3 terhadap Y.....	65

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di seluruh dunia, baik negara maju maupun berkembang senantiasa memperhatikan pembangunan dalam negaranya. Unsur pembangunan yang mendukung kemajuan dari sebuah negara diantaranya adalah sumber daya manusia. Jika suatu negara yang kaya akan sumber daya alam tetapi minim sumber daya manusia, maka akan sulit untuk memajukan negaranya. Tetapi sumber daya manusia yang baik tentunya akan dapat mengelola kekayaan yang dimiliki suatu negara dengan baik pula. Sebagaimana tujuan pembangunan manusia adalah menciptakan suatu lingkungan bagi manusia agar dapat menikmati hidup yang lama, sehat, dan kreatif.

Alasan mengapa pembangunan manusia perlu mendapat perhatian adalah; *pertama*, banyak negara berkembang termasuk Indonesia yang berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi gagal mengurangi kesenjangan sosial ekonomi dan kemiskinan. *Kedua*, banyak negara maju yang mempunyai tingkat pendapatan tinggi ternyata tidak berhasil mengurangi masalah-masalah sosial, seperti; penyalahgunaan obat, AIDS, alkohol, gelandangan, dan kekerasan dalam rumah tangga. *Ketiga*, beberapa negara berpendapatan rendah mampu mencapai tingkat pembangunan manusia yang tinggi karena mampu menggunakan secara bijaksana semua sumber daya untuk mengembangkan kemampuan dasar manusia.

Peningkatan pembangunan manusia dapat dicermati dari besar kecilnya IPM (Indeks Pembangunan Manusia). Apabila IPM mengalami peningkatan,

maka dapat diduga bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat juga akan mengalami peningkatan. Jika tingkat kesejahteraan masyarakat meningkat, pada gilirannya penduduk miskin menjadi semakin berkurang baik dari segi jumlah maupun kualitasnya. Dalam perencanaan pembangunan manusia yang dilakukan suatu daerah pastinya memerlukan dukungan terutama dari pemerintah. Dukungan tersebut dapat diwujudkan melalui alokasi anggaran di sektor-sektor yang menunjang pembangunan manusia, diantaranya sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi dan sosial. Saat ini pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur keuangannya sendiri. Hal tersebut dimulai sejak terjadinya desentralisasi keuangan melalui otonomi daerah yang dimulai sejak tahun 2001. Otonomi daerah mulai ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, yang kemudian direvisi menjadi UU No.32/2004 dan UU No. 34/2004. Pelaksanaan kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal didasarkan pada pertimbangan bahwa daerahlah yang lebih mengetahui kebutuhan dan standar pelayanan bagi masyarakat di daerahnya, sehingga pemberian otonomi daerah diharapkan dapat memacu peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi. Adanya peningkatan dana desentralisasi yang ditransfer pemerintah pusat setiap tahunnya diharapkan dapat mendorong peningkatan laju pertumbuhan ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi daerah dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh pembangunan manusia. Pada hakekatnya pembangunan adalah pembangunan manusia, sehingga perlu diprioritaskan alokasi belanja untuk keperluan ini dalam penyusunan anggaran. Sehingga dengan kebutuhan yang dimiliki oleh masing-masing daerah, tujuan

pembangunan manusia melalui anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah dapat tercapai. Masing-masing daerah otonom diberikan kewajiban dan kewenangan untuk menyusun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

APBD disusun oleh suatu daerah untuk meningkatkan daerah dan kesejahteraan masyarakatnya. Dengan adanya APBD, suatu daerah dapat memaksimalkan sumber-sumber pendapatan daerah, lalu membelanjakan dana tersebut sesuai program dan kegiatan yang telah ditentukan dalam peraturan daerah setempat. Sumber-sumber pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Sedangkan pengeluaran dilakukan oleh daerah dalam bentuk belanja daerah. Di Provinsi Sulawesi Selatan sendiri beberapa daerah mengalami perkembangan pembangunan yang cukup pesat salah satu wilayah tersebut adalah Kabupaten Enrekang. Dana Anggaran Belanja Pembangunan pada APBD Kabupaten Enrekang mengalami peningkatan setiap tahunnya. Sektor-sektor penunjang pembangunan manusia seperti sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi juga turut mengalami peningkatan anggaran.

Untuk dapat menggambarkan kondisi social ekonomi di Kabupaten Enrekang maka dibutuhkan data mengenai pembangunan manusia yang representative khususnya yang terkait dengan belanja pemerintah (belanja pendidikan, belanja kesehatan, belanja ekonomi, dan belanja sosial) dan bagaimana pengaruhnya terhadap Pembangunan Manusia itu sendiri. Perkembangan IPM di Kabupaten Enrekang masih sangat dipengaruhi oleh komponen-komponen penyusunnya, peningkatan nilai IPM akan sangat bergantung pada komitmen penyelenggara pemerintahan untuk dapat

meningkatkan kapasitas dasar penduduk yang berdampak pada peningkatan kualitas hidup.

Berdasarkan kondisi tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian ilmiah dengan judul **“Pengaruh Belanja Pemerintah Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah belanja pemerintah pada sector Pendidikan berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di kabupaten Enrekang periode 2007-2016?
2. Apakah belanja pemerintah pada sector Kesehatan berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di kabupaten Enrekang periode 2007-2016?
3. Apakah belanja pemerintah pada sector Ekonomi berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di kabupaten Enrekang periode 2007-2016?

C. Manfaat Dan Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini ialah:

1. Menganalisis besar pengaruh belanja pemerintah daerah pada sector Pendidikan terhadap indeks pembangunan manusia di kabupaten Enrekang tahun 2007-2016.

2. Menganalisis besar pengaruh belanja pemerintah daerah pada sector Kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia di kabupaten Enrekang tahun 2007-2016.
3. Menganalisis besar pengaruh belanja pemerintah daerah pada sector Ekonomi terhadap indeks pembangunan manusia di kabupaten Enrekang tahun 2007-2016.

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Bagi peneliti, penelitian ini berguna untuk menambah pengetahuan sertamenyelaraskan apa yang di dapat selama kuliah dengan yang terjadi.
2. Sebagai masukan atau informasi kepada para pengambil kebijakan pada pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah serta instansi terkait dalam menentukan langkah-langkah kebijakan agar dapat meningkatkan indeks pembangunan manusia.
3. Sebagai bahan referensi dan pembandingan bagi para peneliti lain yang ingin meneliti masalah ini dengan memasukkan determinan atau variabel-variabel lain yang turut mempengaruhi indeks pembangunan manusia.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Pustaka

1. Pembangunan Manusia

Pada dasarnya konsep pembangunan manusia adalah meletakkan manusia sebagai pusat pembangunan dengan upaya dilakukan perbaikan riil dalam hidup manusia di samping materi yang mengukur pendapatan atau kesejahteraan. Di bawah paradigma ini maka pertumbuhan ekonomi adalah perlu (*necessary*) tetapi bukan kondisi yang cukup (*sufficient*) untuk pembangunan manusia. Hampir dua dekade yang lalu *Human Development Report* memberikan pesan yang jelas bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan ukuran pembangunan yang penting namun terbatas dalam menangkap arti pendapatan ke dalam definisi pembangunan manusia yang luas.

Definisi Pembangunan Manusia menurut UNDP (*United Nation Development Program*) adalah suatu proses untuk memperluas pilihan-pilihan bagi penduduk. Jika mengacu pada pengertian tersebut, maka penduduk menjadi tujuan akhir dari pembangunan, sedangkan upaya pembangunan merupakan sarana (*principal means*) untuk tujuan tersebut. Proses yang memperhatikan penciptaan lingkungan yang mendukung dimana manusia dapat mengembangkan potensi dan berperan produktif secara penuh serta hidup kreatif berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan. Konsep luas dengan banyak dimensi merupakan cara memperluas pilihan manusia. Di antara dimensi kritis dan paling dasar adalah hidup sehat dan panjang, mempunyai akses ke ilmu pengetahuan, dan standar hidup layak. Tanpa dimensi dasar ini, maka

dimensi yang lain seperti kebebasan politik, kemampuan untuk berpartisipasi dalam komunitas, penghargaan diri dan lain-lain tidak dapat dicapai. Pembangunan manusia memperkenalkan konsep yang lebih luas dan lebih komprehensif yang mencakup semua pilihan yang dimiliki oleh manusia pada semua golongan masyarakat dan semua tahap pembangunan. Pembangunan manusia merupakan perwujudan tujuan jangka panjang dari suatu masyarakat dan meletakkan pembangunan di sekeliling manusia, bukan manusia di sekeliling pembangunan. Pembangunan manusia memiliki dua sisi: *pertama*, fungsi dari keberdayaan manusia dan *kedua*, pemakaian keberdayaan itu untuk keseimbangan kehidupan dan tujuan produksi (*National Human Development for Balize, 1997*).

Sebagaimana laporan UNDP (2003), dasar pemikiran konsep pembangunan manusia meliputi aspek-aspek sebagai berikut:

- 1). Pembangunan harus mengutamakan penduduk sebagai pusat perhatian.
- 2). Pembangunan dimaksudkan untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi penduduk, bukan hanya untuk meningkatkan pendapatan mereka. Oleh karena itu, konsep pembangunan manusia harus berpusat pada penduduk secara komprehensif dan bukan hanya pada aspek ekonomi semata.
- 3). Pembangunan manusia memperhatikan bukan hanya pada upaya meningkatkan kemampuan/kapasitas manusia, tetapi juga pada upaya-upaya memanfaatkan kemampuan/kapasitas manusia tersebut secara optimal.
- 4). Pembangunan manusia didukung empat pilar pokok, yaitu: produktifitas, pemerataan, kesinambungan dan pemberdayaan.

- 5). Pembangunan manusia menjadi dasar dalam penentuan tujuan pembangunan dan dalam menganalisis pilihan-pilihan untuk mencapainya.

Aspek pembangunan manusia ini dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks Pembangunan Manusia ini merupakan salah satu alternatif pengukuran pembangunan selain menggunakan Gross Domestic Bruto. Nilai IPM suatu negara atau wilayah menunjukkan seberapa jauh negara atau wilayah itu telah mencapai sasaran yang ditentukan yaitu angka harapan hidup, pendidikan dasar bagi semua lapisan masyarakat, tingkat pengeluaran dan konsumsi yang telah mencapai standar hidup yang layak.

2. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan suatu indeks komposit yang juga merupakan indikator yang dapat menggambarkan perkembangan pembangunan manusia secara terukur dan representative. IPM diperkenalkan pertama kali pada tahun 1990 oleh UNDP. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencakup tiga komponen yang dianggap mendasar bagi manusia dan secara operasional mudah dihitung untuk menghasilkan suatu ukuran yang merefleksikan upaya pembangunan manusia. Ketiga komponen tersebut adalah peluang hidup (*longevity*), pengetahuan (*knowledge*), dan hidup layak (*living standards*). Peluang hidup dihitung berdasarkan angka harapan hidup ketika lahir, pengetahuan diukur berdasarkan rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf penduduk berusia 15 tahun ke atas, dan hidup layak diukur dengan pengeluaran per kapita yang didasarkan pada paritas daya beli (*purchasing power parity*).

Nilai IPM suatu negara atau wilayah menunjukkan seberapa jauh negara atau wilayah itu telah mencapai sasaran yang ditentukan yaitu angka harapan hidup 85 tahun, pendidikan dasar bagi semua lapisan masyarakat (tanpa kecuali), dan tingkat pengeluaran dan konsumsi yang telah mencapai standar hidup layak. Semakin dekat nilai IPM suatu wilayah terhadap angka 100, semakin dekat jalan yang harus ditempuh untuk mencapai sasaran itu.

Karena hanya mencakup tiga komponen, maka IPM harus dilihat sebagai penyederhanaan dari realitas yang kompleks dari luasnya dimensi pembangunan manusia. Oleh karena itu, pesan dasar IPM perlu dilengkapi dengan kajian dan analisis yang dapat mengungkapkan dimensi-dimensi pembangunan manusia yang penting lainnya yang tidak seluruhnya dapat diukur seperti kebebasan politik, kesinambungan lingkungan, dan pemerataan antar generasi.

IPM kemudian disempurnakan oleh *United Nation Development Programme* (1990). Alasan penyempurnaan tidak lain karena manusia adalah ukuran keberhasilan dari pembangunan. Sehingga ukuran bobot manusia saja tidaklah cukup, dan karenanya diperlukan penggabungan antara pencapaian penghasilan dengan kondisi fisik dan non fisik manusia. Alasannya pembangunan manusia adalah pembentukan kemampuan manusia yang berasal dari peningkatan kesehatan, keahlian dan ilmu pengetahuan. Dengan demikian formulasi IPM diukur dari indeks kematian bayi dari 1000 kelahiran hidup, rata-rata panjangnya usia penduduk dan kemampuan penduduk untuk baca tulis (melek huruf) serta penghasilan per kepala.

Tingkat pendidikan dan kesehatan individu penduduk merupakan faktor dominan yang perlu mendapat prioritas utama dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dengan tingkat pendidikan dan kesehatan penduduk

yang tinggi menentukan kemampuan untuk menyerap dan mengelola sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baik dalam kaitannya dengan teknologi sampai kelembagaan yang penting dalam upaya meningkatkan tingkat kesejahteraan penduduk itu sendiri yang semuanya bermuara pada aktivitas perekonomian yang maju.

a. Metode Perhitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Komponennya

Penyusunan indeks untuk setiap komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dapat dilakukan dalam beberapa tahap yaitu :

- 1) Tahapan pertama penghitungan IPM adalah menghitung indeks masing-masing komponen IPM (kesehatan, pengetahuan, dan standar hidup layak) dengan hubungan matematis sebagai berikut:

$$\text{Indeks } (X_i) = (X_i - X_{\min}) / (X_{\max} - X_{\min})$$

X_i = indikator komponen IPM ke- i ($i = 1,2,3$)

X_{\max} = nilai maksimum X_i

X_{\min} = nilai minimum X_i

Persamaan di atas akan menghasilkan nilai 0 X_i 1, untuk mempermudah cara membaca skala dinyatakan dalam 100 persen sehingga interval nilai menjadi 0 X_i 100.

- 2) Tahapan kedua penghitungan IPM adalah menghitung rata-rata sederhana dari masing-masing indeks X_i dengan hubungan matematis:

$$\begin{aligned} \text{Indeks Pembangunan Manusia (IPM)} &= 1/3 X_i \\ &= 1/3 (X_1 + X_2 + X_3) \end{aligned}$$

Dimana:

X_1 = indeks angka harapan hidup

$X_2 = 2/3$ (indeks melek huruf) + $1/3$ (indeks rata-rata lama sekolah)

X_3 = indeks konsumsi per kapita yang disesuaikan

Indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yaitu :

a. Indeks Harapan Hidup

Indeks Harapan Hidup merupakan salah satu indikator pembangunan manusia. Dalam berbagai publikasi Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan bagian dari pembangunan di bidang kesehatan yang menunjukkan jumlah tahun hidup yang diharapkan dapat dinikmati penduduk suatu wilayah. Dengan memasukkan informasi mengenai angka kelahiran dan kematian per tahun variabel diharapkan akan mencerminkan rata-rata lama hidup sekaligus hidup sehat masyarakat.

Sehubungan dengan sulitnya mendapatkan informasi orang yang meninggal pada kurun waktu tertentu, maka untuk menghitung angka harapan hidup digunakan metode tidak langsung (metode *Brass Varian Trussel*). Data dasar yang dibutuhkan dalam metode ini adalah rata-rata anak lahir hidup dan rata-rata anak masih hidup dari wanita pernah kawin. Untuk mendapatkan Indeks Harapan Hidup dengan cara menstandarkan angka harapan hidup terhadap nilai maksimum dan minimumnya. Faktor-faktor yang dapat berpengaruh pada angka harapan hidup adalah faktor lingkungan, status sosial ekonomi penduduk, keberadaan fasilitas dan tenaga kesehatan serta keadaan status gizi penduduk. Dalam konsep perencanaan pembangunan faktor-faktor ini selalu dibahas kaitannya dengan sektor kesehatan. Dengan demikian angka harapan hidup mewakili indikator kesehatan dalam menilai kesejahteraan penduduk.

b. Indeks Pendidikan

Penghitungan Indeks Pendidikan (IP) mencakup dua indikator yaitu angka melek huruf/ *Adult Literacy Rate Index* (Lit) dan rata-rata lama sekolah/ *Mean Years Of Schooling Index* (MYS). Populasi yang digunakan adalah penduduk berumur 15 tahun ke atas karena pada kenyataannya penduduk usia tersebut sudah ada yang berhenti sekolah. Batasan ini diperlukan agar angkanya lebih mencerminkan kondisi sebenarnya mengingat penduduk yang berusia kurang dari 15 tahun masih dalam proses sekolah atau akan sekolah sehingga belum pantas untuk rata-rata lama sekolahnya.

Angka melek huruf diolah dari variabel kemampuan membaca dan menulis, sedangkan rata-rata lama sekolah dihitung menggunakan tiga variabel secara simultan yaitu partisipasi sekolah, tingkat/kelas yang sedang/pernah dijalani, dan jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan.

Kedua indikator pendidikan ini dimunculkan dengan harapan dapat mencerminkan tingkat pengetahuan (cerminan angka Lit), dimana Lit merupakan proporsi penduduk yang memiliki kemampuan baca tulis dalam suatu kelompok penduduk secara keseluruhan. Sedangkan cerminan angka MYS merupakan gambaran terhadap keterampilan yang dimiliki penduduk.

c. Indeks Daya Beli

Berbeda dengan UNDP yang menggunakan indikator GDP per kapita riil yang telah disesuaikan sebagai indikator standar hidup layak. Di Indonesia menggunakan rata-rata pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan atau daya beli yang disesuaikan (*purchasing power parity*).

Untuk perhitungan IPM sub nasional (provinsi atau kabupaten/kota) tidak memakai PDRB per kapita karena PDRB per kapita hanya mengukur produksi

suatu wilayah dan tidak mencerminkan daya beli riil masyarakat yang merupakan konsen IPM. Untuk mengukur daya beli penduduk antar provinsi di Indonesia, BPS menggunakan data rata-rata konsumsi 27 komoditi terpilih dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) yang dianggap paling dominan dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia dan telah distandarkan agar bisa dibandingkan antar daerah dan antar waktu yang disesuaikan dengan indeks PPP (*Purchasing Power Parity*).

3. Belanja Pemerintah

APBD terdiri atas pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran uang dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Banyak pertimbangan yang mendasari pengambilan keputusan pemerintah dalam mengatur pengeluarannya. Pemerintah tidak cukup hanya meraih tujuan akhir dari setiap kebijakan pengeluarannya. Tetapi juga harus memperhitungkan sasaran antara yang akan menikmati kebijaksanaan tersebut. Memperbesar pengeluaran dengan tujuan semata-mata untuk meningkatkan pendapatan nasional atau memperluas kesempatan kerja adalah pendapatannya. Pemerintah pun perlu menghindari agar peningkatan perannya dalam perekonomian tidak melemahkan kegiatan pihak swasta.

Penyusunan belanja pembangunan selalu didasarkan pada kebutuhan nyata dari masyarakat tingkat bawah, untuk menentukan alokasi belanja pembangunan terhadap proyek-proyek yang dibangun, inisiatif harus datang dari masyarakat itu sendiri melalui lembaga pemerintahan yang berada ditingkat bawah. Adapun belanja investasi/pembangunan terdiri dari:

1. Belanja publik adalah belanja yang manfaatnya dapat dinikmati secara langsung oleh masyarakat. Belanja publik merupakan belanja modal (*capital expenditure*) yang berupa investasi fisik pembangunan infrastruktur yang mempunyai nilai ekonomis lebih dari satu tahun dan mengakibatkan terjadinya penambahan aset daerah.
2. Belanja aparatur adalah belanja yang manfaatnya tidak secara langsung dinikmati oleh masyarakat, tetapi dirasakan secara langsung oleh aparatur. Belanja aparatur menyebabkan terjadinya penambahan aktiva tetap dan aktiva tidak lancar lainnya. Belanja aparatur diperkirakan akan memberikan manfaat pada periode berjalan dan periode yang akan datang.
3. Pengeluaran transfer adalah pengalihan uang dari pemerintah daerah dengan kriteria:
 - 1). Tidak menerima secara langsung imbalan barang dan jasa seperti layaknya terjadi transaksi pembelian dan penjualan.
 - 2). Tidak mengharapkan dibayar kembali dimasa yang akan datang, seperti yang diharapkan pada suatu pinjaman.
 - 3). Tidak mengharapkan adanya hasil pendapatan, seperti layaknya yang diharapkan pada suatu investasi.

4. Belanja Pemerintah di Sektor Pendidikan

Teori pertumbuhan ekonomi yang berkembang saat ini didasari kepada kapasitas produksi tenaga manusia didalam proses pembangunan atau disebut juga *investment in human capital*. Hal ini berarti peningkatan kemampuan masyarakat menjadi suatu tumpuan yang paling efisien dalam melakukan pembangunan disuatu wilayah.

Namun demikian masalah yang harus diperhatikan lebih lanjut oleh pemerintah adalah distribusi pendidikan yang tidak merata. Di sisi lain hubungan investasi sumber daya manusia (pendidikan) dengan pertumbuhan ekonomi merupakan dua mata rantai. Namun demikian, pertumbuhan tidak akan bisa tumbuh dengan baik walaupun peningkatan mutu pendidikan atau mutu sumber daya manusia dilakukan, jika tidak ada program yang jelas tentang peningkatan mutu pendidikan dan program ekonomi yang jelas.

Menurut Todaro pendidikan memang memiliki pengaruh yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi melalui 6 cara yaitu; Meningkatnya secara umum kualitas angkatan kerja melalui penanaman pengetahuan kerja dan keterampilan. Meningkatnya mobilitas tenaga kerja dan mempromosikan pembagian kerja. Memungkinkannya penyerapan Informasi baru secara lebih cepat dan penerapan proses baru dan input yang kurang dikenal menjadi lebih efisien. Menghilangkan hambatan hambatan sosial dan kelembagaan bagi pertumbuhan ekonomi. Beraninya wirausahawan untuk mempromosikan tanggung jawab individual, kemampuan organisasional, mengambil resiko yang moderat dan merencanakan dalam jangka panjang. Meningkatnya kemampuan manajemen menjadi lebih sehingga alokasi sumber daya menjadi lebih efisien.

Dari berbagai studi tersebut sangat jelas dapat disimpulkan bahwa pendidikan mempunyai pengaruh terhadap pembangunan ekonomi melalui berkembangnya kesempatan untuk meningkatkan kesehatan, pengetahuan, dan keterampilan, keahlian, serta wawasan mereka agar mampu lebih bekerja secara produktif, baik secara perorangan maupun kelompok. Implikasinya, semakin tinggi pendidikan, hidup manusia akan semakin berkualitas. Dalam kaitannya

dengan perekonomian secara umum, semakin tinggi kualitas hidup suatu bangsa, semakin tinggi tingkat pertumbuhan dan kesejahteraan bangsa tersebut.

Investasi dalam hal pendidikan mutlak dibutuhkan maka pemerintah harus dapat membangun suatu sarana dan sistem pendidikan yang baik. Alokasi anggaran pengeluaran pemerintah terhadap pendidikan merupakan wujud nyata dari investasi untuk meningkatkan produktivitas masyarakat. Pengeluaran pembangunan pada sektor pembangunan dapat dialokasikan untuk penyediaan infrastruktur pendidikan dan menyelenggarakan pelayanan pendidikan kepada seluruh penduduk Indonesia secara merata. Anggaran pendidikan sebesar 20 persen merupakan wujud realisasi pemerintah untuk meningkatkan pendidikan.

5. Belanja Pemerintah di Sektor Kesehatan

Kesehatan merupakan kebutuhan mendasar bagi setiap manusia, tanpa kesehatan masyarakat tidak dapat menghasilkan suatu produktivitas bagi negara. Kegiatan ekonomi suatu negara akan berjalan jika ada jaminan kesehatan bagi setiap penduduknya. Terkait dengan teori *human capital* bahwa modal manusia berperan signifikan, bahkan lebih penting daripada faktor teknologi dalam memacu pertumbuhan ekonomi.

Membicarakan kesehatan tidak hanya mempersoalkan pelayanan kesehatan saja, melainkan akan berkaitan dengan kesejahteraan seluruh masyarakat. Secara umum sumber pembiayaan kesehatan berasal dari pemerintah swasta, lembaga kementrian dan pengeluaran langsung oleh rumah tangga terbesar dari segi kualitas pembiayaan kesehatan secara nasional berasal dari pengeluaran rumah tangga. Program-program dibidang kesehatan dan pendidikan lebih berhubungan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Pembangunan kesehatan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Jadi tingkat kesehatan berkorelasi positif terhadap pertumbuhan ekonomi karena dengan terjaganya kesehatan dengan baik, maka produktivitas kerja akan tinggi sehingga mampu mendapatkan upah atau bayaran yang lebih tinggi pula sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidup dan dapat memacu pertumbuhan ekonomi yang cepat.

Kesehatan merupakan prasyarat bagi peningkatan produktivitas. Oleh karena itu, kesehatan juga dapat dilihat dari sebagai komponen pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi yang vital sebagai input produksi agregat, peran gandanya sebagai input produksi agregat, peran gandanya sebagai input maupun output menyebabkan kesehatan sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi.

Implikasi dari penerapan teori *human capital* dibidang perbaikan gizi dan kesehatan adalah perlunya usaha memerangi kemiskinan. Secara umum kesehatan akan berkorelasi dengan tingkat produktivitas penduduk maupun pekerja. Meningkatnya derajat pada kesehatan akan memperpanjang masa kerja dan daya tubuh yang selanjutnya akan berpengaruh pada peningkatan pertumbuhan ekonomi.

6. Belanja Pemerintah di Sektor Ekonomi

Salah satu indikator kemajuan perekonomian suatu daerah dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi secara *agregat* dapat dihitung melalui Produk Domestik Bruto (PDRB) yang rata-rata tertimbang dari tingkat pertumbuhan sektoralnya, artinya apabila suatu sektor mempunyai kontribusi besar dan pertumbuhannya sangat lambat maka hal ini dapat menghambat tingkat pertumbuhan ekonomi secara agregatif. Sebaliknya apabila suatu sektor

mempunyai kontribusi yang relatif besar terhadap totalitas perekonomian maka sektor tersebut mempunyai tingkat pertumbuhan yang tinggi dan sekaligus akan dapat lebih meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Pengeluaran pemerintah memegang peranan penting terutama dalam menyediakan barang dan jasa publik, ketersediaan barang dan jasa publik ini akan menentukan pengumpulan modal atau investasi masyarakat/swasta, sehingga akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Terjadinya pengumpulan modal atau investasi akan mendorong sektor produksi meningkat dan pada akhirnya akan mendorong laju pertumbuhan perekonomian.

7. Hubungan Belanja Pemerintah (Pendidikan, Kesehatan, dan Ekonomi) Terhadap Indeks Pembangunan Manusia

1. Model pembangunan tentang perkembangan pengeluaran pemerintah.

Model ini dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave yang menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi. Musgrave berpendapat bahwa dalam suatu proses pembangunan investasi dalam persentase terhadap GNP semakin besar dan persentase investasi pemerintah dalam persentase terhadap GNP semakin menurun. Rostow mengatakan bahwa dalam tingkat lanjut dari pembangunan ekonomi, aktivitas pemerintah beralih dari penyediaan prasarana ke pengeluaran untuk pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Rostow dan Musgrave yang menghubungkan perkembangan pengeluaran atau belanja pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yaitu tahap awal, tahap menengah dan tahap lanjut. Pada tahap awal perkembangan ekonomi, presentase investasi pemerintah terhadap total investasi besar sebab pada tahap ini pemerintah harus

menyediakan prasarana seperti pendidikan, kesehatan, prasarana transportasi dan sebagainya.

Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi pemerintah tetap diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat tinggal landas, namun pada tahap ini peranan investasi swasta sudah semakin besar. Peranan pemerintah tetap besar pada tahap menengah, oleh karena peranan swasta semakin besar akan menimbulkan banyak kegagalan pasar dan juga menyebabkan pemerintah harus menyediakan barang dan jasa publik dalam jumlah yang lebih banyak.

Selain itu pada tahap ini perkembangan ekonomi menyebabkan terjadinya hubungan antarsektor yang makin kompleks. Misalnya pertumbuhan ekonomi yang ditimbulkan oleh perkembangan sektor industri akan menimbulkan semakin tingginya pencemaran atau polusi. Pemerintah harus turun tangan mengatur dan mengurangi dampak negatif dari polusi. Pemerintah juga harus melindungi buruh yang berada dalam posisi yang lemah agar dapat meningkatkan kesejahteraan mereka.

Negara sedang berkembang seperti Indonesia sedang mengalami tahap perkembangan menengah, dimana pemerintah harus menyediakan lebih banyak sarana publik seperti kesehatan untuk meningkatkan produktifitas ekonomi. Sarana kesehatan dan jaminan kesehatan harus dirancang sedemikian rupa oleh pemerintah melalui pengeluaran pemerintah.

2. Hukum Wagner mengenai perkembangan aktivitas pemerintah.

Dalam suatu perekonomian apabila perkapita meningkat secara relatif pengeluaran pemerintah akan meningkat. Teori Adolf Wagner menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah dan kegiatan pemerintah semakin lama semakin

meningkat. Tendensi ini oleh Wagner disebut dengan hukum selalu meningkatnya peranan pemerintah. Inti teorinya yaitu makin meningkatnya peran pemerintah dalam kegiatan dan kehidupan ekonomi masyarakat sebagai suatu keseluruhan. Wagner menyatakan bahwa dalam suatu perekonomian apabila pendapatan per kapita meningkat maka secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat terutama disebabkan karena pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat, hukum, pendidikan, rekreasi, kebudayaan dan sebagainya.

Pendidikan dan kesehatan penduduk sangat menentukan kemampuan untuk menyerap dan mengelola sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baik dalam kaitannya dengan teknologi sampai kelembagaan yang penting bagi pertumbuhan ekonomi. Dengan pendidikan yang baik, pemanfaatan teknologi ataupun inovasi teknologi menjadi mungkin untuk terjadi. Seperti diungkapkan oleh Meier dan Rauch (2000), pendidikan, atau lebih luas lagi adalah modal manusia, dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan. Hal ini karena pendidikan pada dasarnya adalah bentuk dari tabungan, menyebabkan akumulasi modal manusia dan pertumbuhan output agregat jika modal manusia merupakan input dalam fungsi produksi agregat.

Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 ada disebutkan bahwa pemerintah, baik pusat maupun daerah, harus mengalokasikan 20 persen anggaran untuk bidang pendidikan di luar gaji dan biaya kedinasan. Jadi, anggaran pendidikan yang dimaksud di sini adalah termasuk kategori anggaran pembangunan karena tidak termasuk di dalamnya anggaran rutin yang berupa gaji dan lain-lain. Sedangkan untuk masalah kesehatan merupakan kebutuhan

mendasar bagi setiap manusia, tanpa kesehatan masyarakat tidak dapat menghasilkan suatu produktivitas bagi negara.

Investasi publik di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi akan memberikan kesempatan yang lebih merata kepada masyarakat sehingga sumber daya manusia handal yang sehat dan mempunyai daya beli yang baik menjadi semakin bertambah. Meningkatnya kesehatan dan pendidikan akan mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan produktivitas tenaga kerja, yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan masyarakat. Dengan demikian diharapkan kondisi ini akan memajukan perekonomian masyarakat dengan bertambahnya kesempatan kerja serta berkurangnya kemiskinan.

Belanja pemerintah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan jaminan sosial dengan mempertimbangkan analisis standar belanja, standar harga, tolak ukur kinerja dan standar pelayanan minimal yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UU 32/2004).

Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, total penerimaan daerah yang didapatkan dari pengelolaan sumber daya dan juga bantuan dari pemerintah, diharapkan akan mendorong peningkatan alokasi dana untuk mensejahterakan masyarakat. Pengalokasian dana belanja pemerintah untuk kesejahteraan, diharapkan lebih besar untuk kemajuan daerah dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Berbagai pemaparan ini menunjukkan bahwa realisasi belanja pemerintah akan memberikan dampak yang berarti bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kualitas pembangunan manusia yang tercermin dari meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

B. Tinjauan Empiris

Ulfa Khaerunnisa Sunardi Awari (2015) dengan judul Pengaruh Belanja pemerintah terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini bertujuan menganalisis seberapa besar pengaruh belanja pemerintah daerah dalam urusan belanja pendidikan, belanja kesehatan dan belanja ekonomi terhadap indeks pembangunan manusia Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan menggunakan panel data selama periode tahun 2009-2013 dengan metode regresi berganda. Perhitungan data dalam penelitian ini menggunakan program EViews 8. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebesar 97% variasi variabel independen dalam penelitian ini dapat menjelaskan variabel indeks pembangunan manusia di Sulawesi Selatan, sedangkan sisanya 3% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar model estimasi. Variabel belanja pendidikan (X1) dan belanja ekonomi (X3) tidak signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Sulawesi Selatan. Belanja kesehatan (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Sulawesi Selatan.

Septiana Sanggelorang, Vekie Rumate dan Hanly Siwu (2015) dengan judul Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Di Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Sulawesi Utara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah daerah pada bidang pendidikan dan kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Data

yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara dan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara. Model analisis yang digunakan adalah berganda, dengan menggunakan SPSS versi 21. Hasil regresi menunjukkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan berpengaruh positif, yaitu meningkat sebesar 0,870 dan secara statistik signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Dan variabel pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan berpengaruh negatif, yaitu sebesar -0,438 dan secara statistik tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia di Sulawesi Utara

Merang Kahang, Muhammad Saleh dan Rachmad Budi Suharto (2016) dengan judul Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten Kutai Timur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah sector Pendidikan dan kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia di kabupaten Kutai Timur. Jenis data pada penelitian menggunakan data sekunder adalah data yang telah tersedia untuk instansi pemerintah yang terlibat dalam masa studi 2009-2014. analisis model dalam penelitian ini dan Program regresi linier berganda digunakan untuk mengolah data uji asumsi klasik dengan menggunakan SPSS 22. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa sektor pengeluaran pemerintah pendidikan (X1) secara signifikan mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (Y) di Kabupaten Kutai Timur. Sektor pengeluaran kesehatan pemerintah (X2) tidak signifikan mempengaruhi indeks pembangunan manusia (Y) di Kabupaten Kutai Timur. Pemerintah menunjukkan sektor pengeluaran kesehatan (X2) belum cukup menyadari dengan baik sehingga tidak cukup kuat mendongkrak indeks pembangunan manusia di Kabupaten Kutai

Timur. Hasil penelitian dari belanja pemerintah di sektor pendidikan (X1) efek dominan dalam meningkatkan indeks pembangunan manusia di Kabupaten Kutai Timur.

Rusmarinda Rakhmawati (2016) dengan judul Pengaruh Indeks Pengaruh Manusia (IPM), Tenaga Kerja Dan Pendidikan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh indeks pembangunan manusia, tenaga kerja, dan pendidikan di Provinsi Jawa Tengah. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari berbagai buku, jurnal dan Badan Pusat Statistik Jawa Tengah. metode analisis yang digunakan adalah alat analisis OLS (*Ordinary Least Square*). Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa variabel IPM berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan variabel pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan dan variabel tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan.

Dwi Heriyanto (2011) dengan judul Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2006-2010. Penelitian ini bertujuan menganalisis seberapa besar pengaruh belanja pemerintah daerah dalam urusan belanja pendidikan, belanja kesehatan dan belanja ekonomi terhadap indeks pembangunan manusia Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan menggunakan panel data selama periode tahun 2009-2013 dengan metode regresi berganda. Perhitungan data dalam penelitian ini menggunakan program EViews 8. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebesar 97% variasi variabel independen dalam penelitian ini dapat menjelaskan variabel indeks pembangunan manusia di Sulawesi Selatan, sedangkan sisanya 3% dipengaruhi

oleh faktor-faktor lain diluar model estimasi. Variabel belanja pendidikan (X1) dan belanja ekonomi (X3) tidak signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Sulawesi Selatan. Belanja kesehatan (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Sulawesi Selatan.

D. Kerangka Konsep

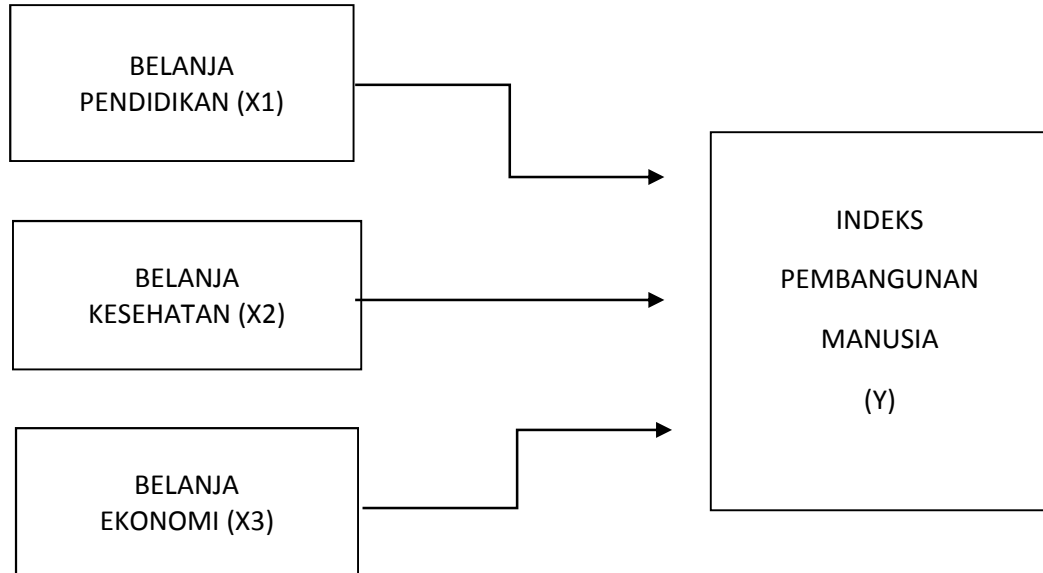
Dengan memperhatikan uraian yang telah dipaparkan terdahulu, maka pada bagian ini akan diuraikan beberapa hal yang dijadikan penulis sebagai landasan berpikir untuk kedepannya. Landasan yang dimaksud akan lebih mengarahkan penulis untuk menemukan data dan informasi dalam penelitian ini guna memecahkan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya. Untuk itu maka penulis menguraikan landasan berpikir dalam gambar yang dijadikan pegangan dalam penelitian.

Pembangunan manusia memperkenalkan konsep yang lebih luas dan lebih komprehensif yang mencakup semua pilihan yang dimiliki oleh manusia pada semua golongan masyarakat dan semua tahap pembangunan. Pembangunan manusia merupakan perwujudan tujuan jangka panjang dari suatu masyarakat dan meletakkan pembangunan di sekeliling manusia, bukan manusia di sekeliling pembangunan.

Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Banyak pertimbangan yang mendasari pengambilan keputusan pemerintah dalam mengatur pengeluarannya. Pemerintah tidak cukup hanya meraih tujuan akhir dari setiap kebijaksanaan pengeluarannya. Tetapi juga harus memperhitungkan sasaran

antara yang akan menikmati kebijaksanaan tersebut. Memperbesar pengeluaran dengan tujuan semata-mata untuk meningkatkan pendapatan nasional atau memperluas kesempatan kerja adalah tidak memadai. Melainkan harus diperhitungkan siapa yang akan terpekerjakan atau meningkat pendapatannya.

Dalam penelitian ini, variabel-variabel yang mempengaruhi indeks pembangunan manusia di Kabupaten Enrekang provinsi Sulawesi Selatan adalah besarnya belanja pemerintah dalam hal ini belanja pendidikan, belanja kesehatan, dan belanja ekonomi karena faktor-faktor ini merupakan faktor yang diyakini berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia di Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan Untuk lebih jelasnya hubungan antara variabel-variabel dengan pembangunan manusia, dapat dilihat pada skema berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Konsep

E. Hipotesis

Berdasarkan permasalahan dan tujuan penelitian, maka dapat dibuat dugaan sementara yaitu :

1. Diduga belanja pemerintah pada sector pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Diduga belanja pemerintah pada sector kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Diduga belanja pemerintah pada sector ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian adalah di Kota Enrekang yang merupakan salah satu daerah di Provinsi Sulawesi Selatan yaitu kantor Badan Pusat Statistik (BPS) kabupaten Enrekang dan instansi terkait yang dianggap mewakili ruang lingkup penelitian.

B. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini berupa data sekunder, dalam bentuk data *time series* periode 2007-2016 Kabupaten/Kota Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan. Data-data yang dimaksud yaitu belanja pendidikan, belanja kesehatan, dan belanja ekonomi yang diperoleh dari APBD Kabupaten/Kota Enrekang di Provinsi Sulawesi Selatan, serta data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS).

C. Metode Analisis Data

Untuk mengetahui pengaruh belanja pendidikan, belanja kesehatan, dan belanja ekonomi terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) di Kabupaten/Kota Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan, digunakan metode regresi berganda. Metode regresi berganda adalah metode regresi yang melibatkan satu variabel respon dengan beberapa variabel bebas. Sedangkan pengolahan data-data dari persamaan regresi dapat diketahui dengan metode *Ordinary Least Square* (metode kuadrat kecil). Metode ini bertujuan untuk menguji hipotesis tentang adanya hubungan sebab akibat antara berbagai variabel yang diteliti berdasarkan data-data yang diperoleh guna mendapatkan makna dan implikasi permasalahan yang ingin dipecahkan secara sistematis, aktual dan akurat.

Metode untuk menganalisis regresi berganda dalam penelitian ini menggunakan *time series* yang mana data yang digunakan diambil dari 10 tahun terakhir yakni tahun 2007-2016. Data *time series* merupakan data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu terhadap suatu individu. Estimasi model yang digunakan yaitu metode kuadrat terkecil (*pooled least square*).

Secara ekonometrika model persamaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \mu$$

Dimana:

Y = Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

X1 = Belanja Pendidikan

X2 = Belanja Kesehatan

X3 = Belanja Ekonomi

α = *intercept*/konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = koefisien regresi

μ = *error term*

D. Uji Kesesuaian

1. Analisis Koefisien Determinasi (R²)

Untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independen yaitu belanja pendidikan (X1), belanja kesehatan (X2), dan belanja ekonomi (X3) terhadap variabel dependen yaitu indeks pembangunan manusia (Y) maka digunakan analisis koefisien determinasi (R²).

Koefisien Determinasi (R²) yang kecil atau mendekati nol berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai R² yang mendekati satu berarti variabel-variabel

independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel-variabel dependen. Akan tetapi ada kalanya dalam penggunaan koefisien determinasi terjadi bias terhadap satu variabel independen yang dimasukkan dalam model. Setiap tambahan satu variabel independen akan menyebabkan peningkatan R², tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen (memiliki nilai t yang signifikan). Nilai R² berkisar antara 0 sampai 1, suatu R² sebesar 1 berarti ada kecocokan sempurna, sedangkan yang bernilai 0 berarti tidak ada hubungan antara variabel tak bebas dengan variabel yang menjelaskan.

2. Uji F

Uji signifikansi ini pada dasarnya dimaksudkan untuk membuktikan secara statistik bahwa seluruh variabel independen yaitu belanja pendidikan (X₁), belanja kesehatan (X₂), dan belanja ekonomi (X₃) berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu indeks pembangunan manusia (Y).

Uji F digunakan untuk menunjukkan apakah keseluruhan variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen dengan menggunakan *Level of significance* 5 persen, Kriteria pengujiannya apabila nilai F-statistik < F-tabel maka hipotesis ditolak yang artinya seluruh variabel independen yang digunakan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Apabila F-statistik > F-tabel maka hipotesis diterima yang berarti seluruh variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen dengan taraf signifikan tertentu.

3. Uji t

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen secara sendiri-sendiri mempunyai pengaruh secara signifikan

terhadap variabel dependen. Dengan kata lain, untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen dapat menjelaskan perubahan yang terjadi pada variabel dependen secara nyata.

Untuk mengkaji pengaruh variabel independen terhadap dependen secara individu dapat dilihat pada hipotesis berikut: $H_0: \beta_1 = 0$ tidak berpengaruh. $H_1: \beta_1 > 0$ berpengaruh positif, $H_1: \beta_1 < 0$ berpengaruh negatif. Dimana β_1 adalah koefisien variabel independen ke-1 yaitu nilai parameter hipotesis. Biasanya nilai dianggap nol, artinya tidak ada pengaruh variabel X_1 terhadap Y . bila $t_{statistik} > t_{tabel}$ maka H_0 diterima (signifikan) dan jika $F_{statistik} < F_{tabel}$ maka H_0 ditolak (tidak signifikan). Uji t digunakan untuk membuat keputusan apakah hipotesis terbukti atau tidak, dimana tingkat signifikan yang digunakan yaitu 5%.

E. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui batasan variabel yang ingin diteliti. Untuk itu definisi operasional variabel dalam penelitian ini adalah:

1. Belanja pendidikan (X_1) merupakan belanja yang dialokasikan dari APBD kabupaten Enrekang untuk membiayai fungsi pendidikan yang dinyatakan dalam satuan rupiah.
2. Belanja kesehatan (X_2) merupakan belanja yang dialokasikan dari APBD kabupaten Enrekang untuk membiayai fungsi kesehatan yang dinyatakan dalam satuan rupiah.
3. Belanja ekonomi (X_3) merupakan belanja yang dialokasikan dari APBD kabupaten Enrekang untuk membiayai fungsi ekonomi yang dinyatakan dalam satuan rupiah.

4. Indeks pembangunan manusia (Y) merupakan indeks komposit yang menggabungkan tiga indikator, yaitu pendidikan (angka melek huruf, rata-rata lama sekolah), kesehatan (angka harapan Hidup), dan pengeluaran perkapita riil yang dinyatakan dalam angka indeks (0-100).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Daerah Penelitian

1. Geografi dan iklim

Kabupaten Enrekang dengan ibu kotanya Enrekang terletak sekitar ± 235 km sampai $3^{\circ}50'00''$ lintang selatan dan $119^{\circ}40'53''$ sampai $12^{\circ}006'33''$ bujur timur dngan luas wilayah 1786,01 km² dengan batas wilayah.(Statistik Kabupaten Enrekang Dalam Angka, hal:5)

Sebelah Utara : Kab. Tana Toraja

Sebelah Selatan : Kab. Luwu

Sebelah Timur : Kab. Sidrap

Sebelah Barat : Kab. Pinrang

Dalam rangka memacu pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Enrekang perlu dilakukan pembangunan manusia. Dimana pembangunan manusia merupakan model pembangunan yang bertujuan untuk memperluas peluang agar penduduk dapat hidup layak. Tujuan tersebut dapat tercapai agar setiap orang dapat memperoleh peluang yang seluas-luasnya untuk hidup sehat dan panjang, untuk berpendidikan dan berketerampilan serta mempunyai pendapatan yang diperlukan untuk hidup. Kualitas modal manusia dapat dicerminkan oleh pendidikan, kesehatan, dan ataupun indikator paritas daya beli. Peningkatan kualitas modal manusia juga akan memberikan manfaat dalam mengurangi ketimpangan antar daerah, sehingga dapat meningkatkan kemajuan suatu daerah

2. Perkembangan Demografis Daerah Penelitian

Kondisi demografi Kabupaten Enrekang ditandai pertumbuhan penduduk yang positif dan populasi yang terus bertambah. Dalam lima tahun terakhir jumlah penduduk Kabupaten/Kota di Enrekang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Kabupaten Enrekang, seperti pada Tabel 4.1 menunjukkan bahwa jumlah penduduk di Kabupaten Enrekang pada tahun 2007 tercatat sebanyak 185.527 jiwa. Sedangkan pada tahun 2016 jumlah penduduk di Provinsi Sulawesi Selatan tercatat sebanyak 201.614 jiwa.

Tabel 4.1

Jumlah Penduduk Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2007-2016 Tahun

Jumlah Penduduk(Jiwa)

Tahun	Jumlah
2007	185.527
2008	188.070
2009	190.576
2010	190.487
2011	192.163
2012	193.683
2013	196.694
2014	198.194
2015	199.998
2016	201.614

Sumber: Data BPS kabupaten Enrekang, Tahun 2017.

3. Perkembangan Perekonomian Kabupaten Enrekang periode 2007-2016

Salah satu indikator kemajuan pembangunan adalah pertumbuhan ekonomi yang dapat dilihat dari besarnya PDRB yang dihasilkan pada satu tahun tertentu dibandingkan dengan nilai tahun sebelumnya. Indikator ini biasanya mengukur kemampuan suatu negara untuk memperbesar outputnya dalam laju yang lebih cepat daripada tingkat pertumbuhan penduduknya.

Struktur lapangan sebagian masyarakat Enrekang tidak mengalami pergeseran dari lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan ke lapangan usaha ekonomi lainnya yang terlihat dari besarnya peranan masing-masing lapangan usaha ini terhadap pembentukan PDRB di Kabupaten Enrekang. (Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Enrekang Tahun 2015). Adapun tabel data laju produk domestik regional bruto adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2

Laju Produk Domestik Regional Bruto Atas Harga Konstan 2010 Lapangan Usaha Kabupaten Enrekang Tahun 2007-2016 (%).

Tahun	Presentase (%)
2007	5,11
2008	6.49
2009	6.62
2010	4.99
2011	6.91
2012	9.50
2013	9.74
2014	7.64
2015	7.65
2016	7.64

Sumber : BPS-Statistik Indonesia tahun 2017

Sumbangan PDRB yang meningkat dari tahun ke tahun merupakan sumbangan dari sektor ekonomi berbagai lapangan usaha. Sektor-sektor tersebut meliputi sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan; sektor pertambangan dan galian; sektor industri pengolahan; sektor listrik, gas dan air; sektor bangunan; sektor perdagangan, restoran dan hotel; sektor angkutan dan komunikasi; sektor bank dan lembaga keuangan; sektor jasa-jasa. Sumbangan PDRB di Kabupaten Enrekang yang paling besar adalah sektor pertanian. Dari laju pertumbuhan ekonomi nampak bahwa selama periode 2007-2016 laju pertumbuhan ekonomi mengalami fluktuatif. Sejak krisis ekonomi, krisis ekonomi 1997, hal ini berdampak juga pada perekonomian di Kabupaten Enrekang hal ini

dapat di lihat pada tabel 4.2 di atas pada tahun 2009 yang awalnya laju pertumbuhan ekonomi yakni sebesar 6,62 % dan pada tahun selanjutnya atau tahun 2011 mengalami penurunan yakni sebesar 1,63 % dan tiga tahun selanjutnya mengalami peningkatan yakni pada tahun 2011-2013 laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Enrekang mengalami peningkatan yakni 0,24-2,59 %, dan kemudian pada tahun 2014 laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Enrekang mengalami penurunan yang cukup signifikan yakni 2,1 %. tahun 2015 laju pertumbuhan ekonomi meningkat yaitu sebesar 7.65 % dan kembali menurun sebesar 1 % yakni di tahun 2016 laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Enrekang sebesar 7,64 %.

B. Deskripsi Variable Penelitian

1. Perkembangan Komponen Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Enrekang Tahun 2007-2016

Pembangunan manusia merupakan paradigma pembangunan yang menempatkan manusia sebagai fokus dan sasaran akhir dari seluruh kegiatan pembangunan, yaitu tercapainya penguasaan atas sumber daya guna memperoleh pendapatan untuk mencapai hidup layak, peningkatan derajat kesehatan agar meningkat usia hidup panjang dan sehat serta meningkatkan pendidikan (kemampuan baca tulis) dan keterampilan manusia. perencanaan pembangunan sosial ekonomi yang baik haruslah didukung dengan data yang lengkap dan akurat untuk dapat menentukan strategi, pengambilan keputusan dan evaluasi hasil yang telah dicapai. Kebijakan strategi yang dilakukan perlu dimonitor yang diketahui hasilnya, disitulah dibutuhkan data mengenai pembangunan manusia yang representative untuk dapat menggambarkan kondisi sosial ekonomi di Kabupaten Enrekang khususnya terkait dengan

pembangunan manusia.(Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Enrekang tahun 2016).

Data yang digunakan untuk penyusunan IPM Kabupatn Enrekang sebagian besar merupakan data primer yang merupakan data yang dikumpulkan langsung oleh BPS Kabupaten Enrekang dengan SUSENAS pertriwulan. BPS mengumpulkan data sosial kependudukan yang relatif cukup luas cakupannya antara lain bidang pendidikan, kesehatan, gizi, perumahan, sosial budaya,konsumsi dan pengeluaran rumah tangga dan sosial ekonomi lainnya, yang di kenal dengan SUSENAS MKP (modul kesehatan dan perumahan) dan SUSENAS KP (Konsumsi Pengeluaran).

Komponen-komponen Angka Harapan Hidup (AHH), Angka Melek Huruf (AMH), Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Kemampuan Daya Beli (PPP) digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan sosial ekonomi suatu daerah yang ditunjukkan oleh besar kecilnya angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pada Tabel 4.3 menampilkan *performance* pembangunan manusia yang perlihatkan dengan angka IPM.

Tabel 4.3

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Enrekang Tahun 2007-2016

Tahun	Indeks pembangunan manusia (%)
2007	65.57
2008	66.01
2009	66.27
2010	66.27
2011	67.03
2012	67.74
2013	68.39
2014	69.37
2015	70.03
2016	70.79

Sumber:Badan pusat statistic Enrekang

Pada table 4.3 menunjukkan bahwa dari tahun 2007 hingga tahun 2016 secara umum terjadi kenaikan angka IPM yg sangat signifikan. Rata-rata pencapaian IPM kabupaten Enrekang selama tahun 2007 hingga tahun 2016 adalah 67,74%.

Berdasarkan skala internasional, capaian IPM dapat dikategorikan tinggi (IPM ≥ 80), kategori menengah atas ($66 < \text{IPM} < 80$), kategori menengah bawah ($50 < \text{IPM} < 66$), dan kategori rendah ($\text{IPM} < 50$). Berdasarkan kriteria tersebut maka kabupaten Enrekang pada tahun 2017-2016 merupakan daerah dengan IPM kategori menengah atas. Dengan pencapaian tersebut maka bisa dikatakan bahwa kabupaten Enrekang memiliki sarana dan prasana pada bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi cukup memadai.

Berikut beberapa variabel IPM yang menjadi tolak ukur penelitian di Kabupaten Enrekang.

a. Angka Harapan Hidup

Tujuan dari pembangunan manusia di bidang kesehatan adalah untuk mencapai penduduk dengan umur yang panjang dan sehat, peningkatan derajat kesehatan masyarakat dapat diukur dengan tingkat mortalitas dan morbiditas penduduk. Salah satu yang menentukan angka harapan hidup adalah kematian bayi. Resiko kematian bayi lebih besar bagi bayi yang dilahirkan oleh ibu yang kekurangan gizi, dibandingkan dengan ibu yang memiliki gizi yang cukup. Pada umumnya kekurangan gizi berkorelasi positif dengan keadaan social ekonomi yang rendah. Penyebab tingginya angka kematian bayi selain karena masalah infeksi/penyakit dan berat badan bayi yang rendah waktu lahir, juga berkaitan erat dengan dengan kondisi pada fase kehamilan, pertolongan kelahiran yang

aman dan perawatan bayi saat lahir. (Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Enrekang Tahun 2016).

Dalam sistem kesehatan nasional disebutkan bahwa tujuan pembangunan nasional di bidang kesehatan adalah tercapainya kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum dari tujuan nasional. Angka harapan hidup ini digunakan sebagai proxy terhadap keadaan sistem pelayanan kesehatan suatu masyarakat secara makro. Proses penghitungan angka harapan hidup disediakan program yang mampu mendeteksi normalnya indeks kesehatan. Sehingga dalam perhitungan indeks kesehatan harapan hidup, digunakan angka sebagai standar yang optimum. Berikut ini data tentang angka harapan hidup di Kabupaten Enrekang.

Tabel 4.4

Indeks Angka Harapan Hidup Kabupaten Enrekang Tahun 2007-2016

Tahun	Presentase %
2007	73,70
2008	74.24
2009	74.66
2010	74.99
2011	70.15
2012	70.18
2013	70.20
2014	70.21
2015	70.31
2016	70.34

Sumber : BPS-Statistik Indonesia Tahun 2017

Dari tabel di atas dapat kita ketahui bahwa presentase angka harapan hidup di Kabupaten Enrekang setiap tahunnya pada 10 tahun terakhir mengalami fluktuasi atau berubah-ubah. Ini dapat dibuktikan data dari tahun 2007 sampai

tahun 2010 terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu persentasenya 73,70% sampai 74,99%. Dan pada tahun 2011 sampai tahun 2016 mengalami penurunan yang cukup banyak yaitu 70,34%. Hal yang membuat nilai presentase angka harapan hidup di Kabupaten Enrekang mengalami fluktuasi atau berubah-ubah karena komponen penyusun angka harapan hidup itu sendiri yang terus mengalami perubahan setiap tahunnya. Salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kembali Angka Harapan Hidup di Kabupaten Enrekang yaitu dengan meningkatkan sarana kesehatan yang ada, karena keberadaan fasilitas kesehatan sampai daerah terpencil yang mudah dijangkau oleh seluruh masyarakat terutama bagi masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi tentunya sangat diperlukandalam upaya mencapai pembangunan kesehatan.

b. Rata-Rata Lama Sekolah

Indikator dalam pembangunan manusia salah satunya adalah sector pendidikan yang juga sangat penting dalam meningkatkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Untuk mencapai SDM yang berkualitas dibutuhkan pembentukan modal manusia (*human capital*). Pembentukan modal manusia ini merupakan suatu proses untuk memperoleh sejumlah manusia yang memiliki karakter kuat yang dapat digunakan sebagai modal penting dalam pembangunan. Karakter ini dapat berupa tingkat keahlian dan tingkat pendidikan masyarakat. Pembangunan sector pendidikan dengan memposisikan manusia sebagai fokus dalam pembangunan telah memberikan kontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi suatu Negara. Untuk melihat perkembangan pendidikan di Kabupaten Enrekang tentu yang perlu diperhatikan adalah perbaikan menyeluruh disektor pendidikan tersebut. Sehingga komponen pendidikan dapat terpenuhi dalam mencapai peningkatan indeks pendidikan

secara nasional. Indikator yang digunakan untuk mengukur dimensi pendidikan penduduk adalah Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS). HLS adalah lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan dan dirasakan oleh anak pada umur tertentu dimasa yang akan datang, Tujuan perhitungan HLS adalah untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan diberbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang di harapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Rata-rata lama sekolah mnggambarkan jumlah yang digunakan penduduk 15 tahun ke atas menjalani pendidikan formal. Asumsi yang gunakan untuk menghitung RLS adalah kondisi normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun. Cakupan penduduk yang dihitung pada RLS adalah penduduk berusia 25 tahun keatas. RLS dihitung untuk usia 25 tahun ke atas dengan asumsi bahwa pada umur 25 pendidikan sudah berakhir. Perhitungan RLS pada usia 25 tahun juga menggunakan standar UNDP. (Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Enrekang Tahun 2016).

Tabel 4.5

Indeks Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Enrekang Tahun 2007- 2016

Tahun	Presentase (%)
2007	8,14
2008	8.96
2009	8.25
2010	8.30
2011	8.32
2012	8.34
2013	8.39
2014	7.98
2015	8.05
2016	8.06

Sumber : BPS-statistik Indonesia tahun 2017

Dari tabel di atas kita ketahui bahwa presentase pendidikan di kabupaten Enrekang dalam hal ini yaitu rata-rata lama sekolah di kabupaten Enrekang

mengalami perubahan atau fluktuatif, hal ini dapat di lihat dari tahun 2007-2008 indeks rata-rata lama sekolah di Kabupaten Enrekang mengalami peningkatan 8,14% menjadi 8,96%, kemudian pada tahun 2009 mengalami penurunan sebesar 8,25 %, dan barulah mulai kembali meningkat pada tahun 2010-2013 yaitu dari 8,30 % menjadi 8,39 % hal ini belum menunjukkan kenaikan yang tinggi karena hanya naik sebesar 9 % saja dan kembali menurun pada tahun 2014 mencapai 7,98 % dan kembali mengalami peningkatan di tahun 2015 8,05 % dan tahun 2016 sebesar 8,06%, hal tersebut yang membuat siklus pendidikan di Kabupaten Enrekang mengalami fluktuasi atau berubah-ubah. Tidak selamanya mengalami peningkatan, hal yang menyebabkan keadaan pendidikan di Kabupaten Enrekang mengalami fluktuasi salah satunya adalah mengingat masih minimnya penduduk yang berkualitas dalam arti masih sedikit penduduk yang lulusan SLTA ke atas, maka pemerintah harus membuat suatu terobosan-terobosan demi meningkatkan kualitas pendidikan. Apalagi pemerintah pusat telah menyetujui alokasi sektor pendidikan sebesar 20 % dari APBN. (Indikator Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Enrekang).

c. Paritas Daya Beli

Mengukur Standar kehidupan yang layak, atau biasa disebut dengan Indeks Kesejahteraan Masyarakat. Maka UNDP menggunakan indikator yang dikenal dengan *real per capita GDP Adjusted*. Untuk perhitungan IPM sub nasional (Provinsi atau Kabupaten/Kota) tidak memakai PDRB per kapita karena PDRB hanya mengukur produksi suatu wilayah dan tidak mencerminkan daya beli riil masyarakat yang merupakan concern IPM.

Capaian indeks daya beli di Kabupaten Enrekang dapat di lihat menggunakan indikator hidup layak yang dilihat dari pengeluaran perkapita untuk

menghitung pengeluaran perkapita, pertama adalah dengan menghitung rata-rata pengeluaran perkapita dengan harga konstan (riil) dan langka berikutnya adalah menghitung paritas daya beli disusul kemudian menghitung pengeluaran perkapita yang disesuaikan. (Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Enrekang Tahun 2014).

Mengetahui perkembangan indeks perkembangan daya beli masyarakat, sehingga dalam mengamati perkembangannya pemerintah menetapkan bahwa *Human Development Index* yang merupakan ukuran standar pembangunan manusia. Untuk kabupaten Enrekang sendiri, posisi perkembangan daya beli masyarakat masih sangat terbelah rendah dibandingkan dengan Kabupaten lainnya di Sulawesi-Selatan. Adapun data paritas daya beli sebagai berikut :

Tabel 4.6

Indeks Daya Beli Di Kabupaten Enrekang Pada Tahun 2007-2016

Tahun	Persent(%)
2007	6.320
2008	6.244
2009	6.242
2010	6.286
2011	6.285
2012	6.306
2013	9.250
2014	9.347
2015	9.818
2016	10.188

Sumber : BPS-Statistik Indonesia tahun 2017

Berdasarkan tabel 4.6 di atas dapat dilihat bahwa indeks daya beli di Kabupaten Enrekang pada 10 tahun mengalami fluktuasi atau berubah-ubah pada tahun 2007 jumlah presentase sebesar Rp.632.000. namun pada tahun 2008-2009 mengalami penurunan dengan nilai presentase yaitu Rp.624.24, dan barulah kembali meningkat pada tahun 2010 dengan nilai presentase yaitu Rp.628,63, dan pada tahun 2011 mengalami penurunan kembali dengan nilai

presentase sebesar Rp.628.53 dan barulah pada tahun 2012-2016 mengalami kenaikan yang sangat meningkat dengan presentase kenaikan yaitu Rp.630.69 – Rp.10.188. Meskipun pada enam tahun terakhir presentase kenaikan daya beli masyarakat Kab Enrekang meningkat tapi pemerintah janganlah berhenti membuat kebijakan-kebijakan yang dapat mendorong naikknya pertumbuhan ekonomi karena bisa saja di kemudian hari kenaikan yang terjadi pada enam tahun terkahir menurun dengan sangat cepat juga Jadi dengan demikian dapat disimpulkan bahwa masih perlunya ushaa masyarakat dan pemerintah dalam meningkatkan indeks daya beli di Kabupaten Enrekang agar setiap tahunnya bisa mengalami peningkatan yang maksimum sehingga jika kenaikan indeks daya beli masyarakat dan pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Enrekang pada masa yang akan datang.

2. Perkembangan Belanja Bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Ekonomi

Kabupaten Enrekang tahun 2007-2016

Belanja pada sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi merupakan tiga dari sebelas jenis belanja pemerintah menurut fungsi. Ketiga belanja pemerintah menurut fungsi tersebut diprioritaskan pada pembangunan di Provinsi Sulawesi Selatan atas dana otonomi khusus yang diberikan pemerintah pusat. Sehingga dengan memprioritaskan belanja pendidikan, kesehatan, dan ekonomi di kabupaten Enrekang maka diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan dan solusi atas ketertinggalan kabupaten Enrekang dibandingkan dengan Kabupaten lainnya.

a. Perkembangan Belanja Pendidikan Kabupaten Enrekang tahun 2007-2016

Pemerintah Sulawesi Selatan telah menempatkan sektor pendidikan sebagai prioritas utama pembangunan daerah. Di dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPJMPD) Sulawesi Selatan tahun 2008-2013, sektor pendidikan bersama dengan sektor kesehatan menempati agenda pertama dari tujuh agenda pembangunan daerah. Untuk memastikan bahwa semua anak yang berada pada usia sekolah benar-benar duduk di bangku sekolah, pemerintah Sulawesi Selatan sejak tahun 2008 telah mengimplementasikan kebijakan pendidikan gratis di seluruh kabupaten/kota. Bersamaan dengan itu, juga telah dikembangkan berbagai kebijakan lainnya seperti peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, promosi pendidikan, pemberantasan buta aksara, dan pengembangan budaya baca. Hal tersebut yang kemudian jadi fokus pemerintah kabupaten Enrekang untuk meningkatkan perhatian dalam peningkatan kualitas Pendidikan, yang mana bisa dilihat dari peningkatan belanja pendidikan yang terus meningkat setiap tahunnya.

Table 4.7

Perkembangan Belanja Bidang Pendidikan Kabupaten Enrekang tahun 2007-2016 (dalam jutaan rupiah)

Tahun	Jumlah (dalam jutaan rupiah)
2007	115.400
2008	119.675
2009	120.377
2010	146.265
2011	218.096
2012	198.598
2013	217.857
2014	225.898
2015	245.786
2016	270.966

Sumber: Data BPKD Sulawesi Selatan

Pada table 4.7 kita dapat melihat bahwa belanja bidang pendidikan Kabupaten Enrekang cenderung fluktuatif, meskipun relatif fluktuatif namun menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat. Hal ini dapat dilihat dari tahun 2007-2011 angka pada belanja Pendidikan mengalami peningkatann yang sangat signifikan yakni dari angka sebesar Rp.115.400,000 – Rp.218.906,000. meskipun pada tahun 2012 mengalami penurunan menjadi angka sebesar Rp.198.598,000 tapi pada tahun 2013-2016 terus mengalami peningkatan yg sangat signifikan.

b. Perkembangan Belanja Kesehatan Kabupaten Enrekang tahun 2007-2016

Kesehatan merupakan kebutuhan penting dan sekaligus merupakan investasi bagi pembangunan sumber daya manusia agar mereka dapat sehat dan hidup secara produktif. Sektor kesehatan bersama dengan sektor pendidikan merupakan salah satu sektor prioritas utama pembangunan di Provinsi Sulawesi Selatan, dan di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2008-2013, kedua sektor ini menempati agenda pertama dari tujuh agenda pembangunan daerah. Untuk menunjang program utama ini oleh pemerintah Sulawesi Selatan sejak tahun 2008 telah mencanangkan suatu program kesehatan gratis dengan harapan bahwa dengan program tersebut paling tidak telah membawa dampak pada berkurangnya belanja masyarakat untuk kepentingan pembayaran kesehatan yang selama ini sangat memberatkan masyarakat terutama masyarakat golongan ekonomi lemah. Hal inilah yang kemudian jadi perhatian pemerintah daerah kabupaten Enrekang untuk lebih memprioritaskan kepentingan masyarakat agar program kesehatan tersebut bisa dinikmati oleh semua kalangan masyarakat terutama yang berpendapatan lemah

kebawah. Untuk melihat seberapa besar perkembangan belanja pemerintah kabupaten Enrekang dapat di lihat pada table berikut

Tabel 4.8
Perkembangan Belanja bidang Kesehatan Kabupaten Enrekang
tahun 2007-2016

Tahun	Jumlah (dalam jutaan rupiah)
2007	55.902
2008	58.112
2009	65.703
2010	47.757
2011	56.781
2012	57.817
2013	77.724
2014	85.200
2015	98.588
2016	104.778

Sumber: Data BPKD Sulawesi Selatan

Pada table 4.8 menunjukkan peningkatan belanja pemerintah pada bidang kesehatan di kabupaten Enrekang, yang fluktuatif atau berubah-ubah, hal ini dapat dilihat pada tahun 2007-2009 yang mengalami peningkatan yang cukup signifikan yakni dengan angka sebesar Rp.55.902,000 – Rp.65.703,000. Pada tahun berikutnya 2010 mengalami penurunan sebesar Rp.17.946,000. namun pada tahun 2011-2016 kembali mengalami peningkatan yang sangat signifikan.

c. Perkembangan Belanja Ekonomi Kabupaten Enrekang tahun 2007-2016

Untuk mengakselerasi pembangunan perekonomian daerah, peranan pemerintah dapat dikaji melalui pengalokasian dana yang telah dihimpun pemerintah daerah untuk berbagai belanja pemerintah daerah yang tertuang dalam dokumen Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD). APBD

merupakan instrumen kebijakan yang dijalankan pemerintah daerah untuk menentukan arah dan tujuan pembangunan. Instrumen ini diharapkan berfungsi sebagai salah satu komponen pemicu tumbuhnya perekonomian daerah yang salah satunya adalah belanja ekonomi.

Berikut ini menunjukkan tabel belanja daerah kabupaten Enrekang pada bidang ekonomi dari tahun 2007 hingga tahun 2016. Data menunjukkan bahwa belanja pada bidang ekonomi berfluktuasi tetapi dari tahun 2011 hingga tahun 2016 cenderung mengalami peningkatan yang signifikan.

Tabel 4.9
Perkembangan Belanja Bidang Ekonomi Kabupaten Enrekang Tahun 2007-2016 (dalam jutaan rupiah)

Tahun	Jumlah (dalam jutaan rupiah)
2007	31.600
2008	35.795
2009	45.260
2010	39.889
2011	47.800
2012	46.800
2013	51.270
2014	65.877
2015	75.339
2016	85.889

Sumber: Data BPKD Sulawesi Selatan

Dari table diatas menunjukkan bahwa belanja pemerintah daerah bidang ekonomi setiap tahunnya mengalami peningkatan. Pada tahun 2009-2010 mengalami penurunan dari angka Rp.45.260,000 – Rp.39.889,000. Namun pada tahun berikutnya tahun 2011-2016 terus mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Dengan begitu belanja pemerintah bidang ekonomi dari tahun 2007-2016 terus mengalami fluktuasi cenderung mengalami peningkatan.

C. Hasil Analisis

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode kuantitatif menggunakan pemodelan regresi linear berganda hal ini dilakukan karena peneliti berusaha menjelaskan hubungan dan pengaruh variabel-variabel independen terhadap variable dependen. Dengan menggunakan data *time series* yang mana data yang digunakan diambil dari 10 tahun terakhir yakni 2007-2016.

Perhitungan data dalam penelitian ini menggunakan program SPSS yang membantu dalam pengujian hipotesis-hopotesis secara parsial maupun Bersama-sama.

1. Hasil Uji

a. Koefisien Determinasi (Uji R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi-variasi dependen. Nilai koefisien determinasi adalah nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel dependen yang terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang berhubungan dengan variabel dependen. Berikut hasil uji koefisien determinasi:

Table 4.10

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.987(a)	.974	.960	.36405

a Predictors: (Constant), B.Ekonomi (X3), B.Pendidikan (X1), B.Kesehatan (X2)

Sumber: Hasil pengujian dengan menggunakan SPSS 15.0

Dari hasil regresi pengaruh variabel belanja sektor Pendidikan (X1), belanja sektor kesehatan (X2), belanja sektor ekonomi (X3) terhadap IPM (Y) diperoleh dengan nilai R^2 sebesar 0.974. Berdasarkan (lampiran 1) berarti variasi variabel belanja sektor Pendidikan (X1), belanja sektor kesehatan (X2), belanja sektor ekonomi (X3) terhadap IPM (Y) di Kabupaten/Kota Enrekang periode 2007-2016 sebesar 97,4%. Adapun sisanya variasi variabel yang lain dijelaskan diluar model sebesar 2,6,% seperti kemiskinan dan pendapatan perkapita.

b. Pengujian Signifikansi secara Parsial (Uji t)

Uji signifikansi individu (Uji t) bermaksud untuk melihat signifikansi pengaruh variabel independen secara individu terhadap variabel dependen. Parameter yang digunakan adalah suatu variabel independen dikatakan secara signifikan. Pengaruh belanja sektor pendidikan (X1), belanja sektor kesehatan (X2), belanja sektor ekonomi (X3) terhadap IPM (Y) di Kabupaten/Kota Enrekang periode 2007-2016 dengan menggunakan taraf keyakinan 95% ($\alpha = 0,05$) dan maka diperoleh t_{tabel} sebesar 2,447.

Table 4.11

Uji signifikansi t ($\alpha = 0.05$) untuk pengaruh X1,X2 dan X3 terhadap Y

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	61.480	.504		122.103	.000
	B.Pendidikan (X1)	1.33E-005	.000	.420	3.103	.021
	B.Kesehatan (X2)	3.08E-005	.000	.331	1.717	.137
	B.Ekonomi (X3)	3.01E-005	.000	.290	1.127	.303

a Dependent Variable: IPM (Y)

Sumber: Hasil prngujian dengan menggunakan program SPSS 15.0

Dari hasil analisis tersebut dapat diketahui nilai $t_{\text{statistik}}$ variabel bebas belanja pendidikan (X1) sebesar 3,103, nilai $t_{\text{statistik}}$ belanja kesehatan (X2) sebesar 1,717, dan nilai $t_{\text{statistik}}$ belanja ekonomi (X3) sebesar 1,127. Dari hasil regresi variabel bebas belanja Pendidikan (X1) memperlihatkan bahwa nilai $\text{sig} < 0,05$ dan $t_{\text{statistik}} > t_{\text{tabel}}$ sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel bebas belanja Pendidikan (X1) positif & signifikan mempengaruhi indeks pembangunan manusia (Y). Sedangkan hasil regresi kedua variable yaitu belanja Kesehatan (X2) dan belanja Ekonomi (X3) memperlihatkan bahwa $t_{\text{statistik}} < t_{\text{tabel}}$ sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel bebas tersebut secara individu berpengaruh positif namun tidak nyata terhadap indeks pembangunan manusia (Y).

c. Pengujian Signifikansi secara Simultan (Uji F)

Uji F-statistik ini adalah pengujian yang bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh koefisien regresi secara bersama-sama terhadap variable dependen. Berikut ini merupakan tabel hasil uji signifikansi F pada model estimasi penelitian:

Table 4.12

uji signifikansi F (=0,05)

Untuk pengaruh X1, X2, Dan X3 terhadap Y

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	29.497	3	9.832	89.857	.000(a)
	Residual	.657	6	.109		
	Total	30.153	9			

a Predictors: (Constant), B.Ekonomi (X3), B.Pendidikan (X1), B.Kesehatan (X2)

b Dependent Variable: IPM (Y)

Sumber: Hasil pengujian dengan menggunakan program SPSS 15.0

Pengaruh belanja sektor pendidikan (X1), belanja sektor kesehatan (X2), belanja sektor ekonomi (X3), pertumbuhan ekonomi (X4) terhadap IPM (Y) di Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan periode 2007-2016 taraf keyakinan 95% ($\alpha = 0,05$), dengan menggunakan Rumus $F_{table} = F(k; n-k)$, $F_{table} = F(3; 10-3)$ maka di dapat $F_{table} = F(3; 7)$ dengan nilai 4,35. Dari hasil regresi linear diperoleh $F_{statistik}$ sebesar 89,857 maka $F_{statistik} > F_{tabel}$ ($89,857 > 2.40$). Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel independen yang digunakan dalam model secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap variable dependen.

D. Analisis Hasil

Hasil interpretasi data pengaruh belanja pendidikan, belanja kesehatan dan belanja ekonomi terhadap indeks pembangunan manusia di daerah Kabupaten Enrekang pada tahun 2007-2016 dapat dilihat pada Tabel 4.13. Berdasarkan penentuan model analisis pada lampiran 1 dan lampiran 2 maka berikut adalah ringkasan interpretasi data pada Tabel 4.13.

Dari Tabel 4.13 menunjukkan bahwa belanja Pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di kabupaten Enrekang tahun 2007 hingga tahun 2016. Hal ini terlihat pada Tabel 4.13 yang menunjukkan nilai sig nya lebih kecil dari 5% (0,05) yaitu 0,021 dan nilai $t_{statistik}$ X1 menunjukkan angka 3,103 yang lebih besar dari t_{table} 2,447. Yang artinya bahwa belanja pendidikan (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia.

Table 4.13

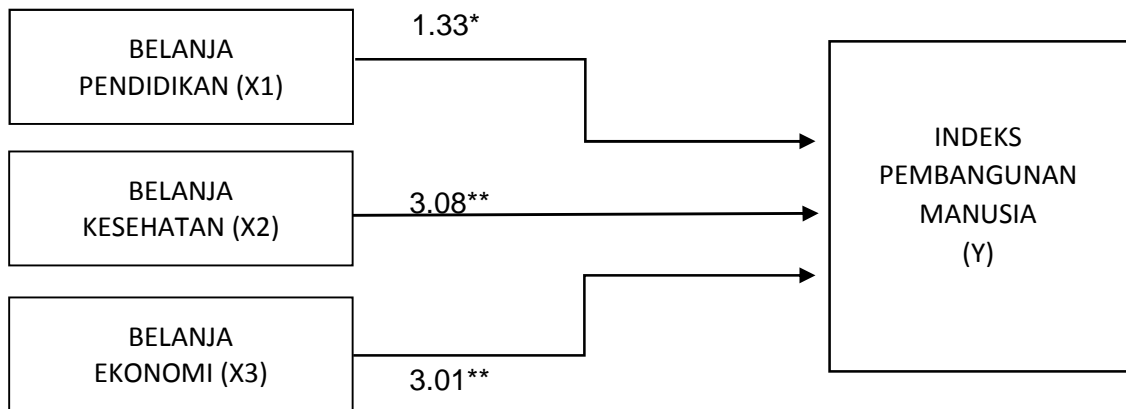
Pengaruh Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan dan Belanja Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Enrekang tahun 2007-2016

Variable bebas	koefisien	B ($t_{\text{statistik}}$)	Sig	R Square	F ($F_{\text{statistik}}$)	Pengaruh variable
X1	1.33E-005	3.103	0.021	0.974	89.857	Positif dan Signifikan
X2	3.08E-005	1.717	0.137	0.974	89.857	Positif namun tidak signifikan
X3	3.01E-005	1.127	0.303	0.974	89.857	Positif namun tidak signifikan

Sumber: Data sekunder yang diolah dari SPSS

Hasil regresi menunjukkan bahwa belanja kesehatan berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di kabupaten Enrekang tahun 2007 hingga tahun 2016. Hal ini terlihat pada Tabel 4.13 yang menunjukkan nilai sig nya lebih dari 5% (0,05) yaitu 0,137 dan nilai $t_{\text{statistik}}$ X2 sebesar 1.717. Yang artinya bahwa belanja kesehatan (X2) berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Selanjutnya, data menunjukkan bahwa belanja ekonomi positif namun tidak signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di kabupaten Enrekang periode 2007-2016. Hal ini terlihat pada Tabel 4.13 yang menunjukkan nilai sig lebih besar dari 5% (0,05) yaitu 0.303 dan nilai $t_{\text{statistik}}$ X3 sebesar 1.127. Hal ini bahwa belanja ekonomi (X3) positif berpengaruh namun tidak signifikan terhadap indeks pembangunan manusia.

Hasil dari interpretasi data tersebut jika dikembalikan pada kerangka konseptual, maka akan terlihat seperti pada Gambar 2.1



Gambar 4.1

Kerangka Konsep dengan Hasil Estimasi

Keterangan Gambar:

* : Signifikan pada $\alpha = 5\%$

** : Tidak signifikan pada $\alpha = 5\%$

Gambar 4.1 memberikan informasi mengenai koefisien yang di peroleh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen dari hasil regresi yang telah dilakukan (Lampiran 2). Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, seluruh variabel bebas berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia.

E. Pembahasan

Berdasarkan hasil estimasi, selanjutnya dilakukan analisis pengaruh belanja pendidikan, belanja kesehatan, belanja ekonomi dan pertumbuhan ekonomi terhadap indeks pembangunan manusia dengan mengaitkan terhadap teori-teori ekonomi yang melandasi dan penelitian terkait sebelumnya.

1. Pengaruh Belanja Pendidikan terhadap IPM

Hasil estimasi menunjukkan bahwa belanja pendidikan tahun 2007-2016 positif dan berpengaruh signifikan terhadap IPM di Kabupaten Enrekang dan jika terjadi peningkatan belanja pendidikan sebesar 1 persen akan meningkatkan nilai IPM sebesar 0.0000133 persen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja pendidikan di kabupaten Enrekang dari tahun ke tahun terlihat cenderung mengalami peningkatan dan dari data menunjukkan bahwa belanja pemerintah di bidang pendidikan merupakan belanja tertinggi. Hasil ini juga sejalan dengan analisis yang dilakukan oleh Sanggелorang bahwa pengaruh pengeluaran pemerintah di sector Pendidikan berpengaruh signifikan terhadap IPM karena pemerintah Sulawesi Utara mengalokasikan dana yang besar setiap tahunnya di sector Pendidikan, sehingga IPM di Provinsi Sulawesi Utara selalu mengalami peningkatan (Sanggелorang, 2015:4)

Sesuai dengan teori pengeluaran Adolf Wagner yang menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah dan kegiatan pemerintah semakin lama semakin meningkat sehingga kesejahteraan masyarakat dapat tercapai yang dapat diukur dengan IPM. Belanja pendidikan yang relatif besar dan meningkat ini memberikan kesempatan kepada Kabupaten/Kota Enrekang untuk membiayai pembangunan daerah khusus dibidang pendidikan yang mampu meningkatkan IPM. Secara teoritis belanja pendidikan diberikan kepada daerah dalam rangka membiayai kebutuhan dan pembangunan daerah dibidang pendidikan. Dengan besarnya jumlah belanja pendidikan melalui adanya berbagai program bantuan dari pemerintah sebagian besar penduduk di Kabupaten Enrekang dapat mengenyam pendidikan formal. Dilihat pada angka Rata-rata lama sekolah yang tiap tahun cenderung meningkat.

Selain itu, belanja pendidikan merupakan belanja yang memiliki jumlah tertinggi dibandingkan dengan belanja kesehatan dan belanja ekonomi namun terlihat pada IPM Kabupaten Enrekang yang masih berada dibawah indeks pembangunan nasional. Berdasarkan uraian tersebut, maka diharapkan kabupaten Enrekang untuk terus meningkatkan efektifitas sumber daya yang dimiliki guna untuk mensejahterahkan masyarakatnya dan agar perkembangan dan pertumbuhan daerah tidak tertinggal jauh oleh daerah lain. Kemudian mengupayakan berbagai program dibidang pendidikan yang dapat meningkatkan kualitas.

2. Pengaruh Belanja Kesehatan terhadap IPM

Temuan penelitian dari hasil estimasi menunjukkan bahwa belanja kesehatan berpengaruh positif tapi tidak nyata terhadap indeks pembangunan manusia. Maksud dari hal ini mengindikasikan bahwa besar pengeluaran pemerintah dalam bidang kesehatan ternyata belum berpengaruh secara nyata dalam peningkatkan Indeks Pembangunan Manusia. Artinya, setiap pengeluaran belanja pemerintah bidang kesehatan di Kabupaten Enrekang setiap tahun meningkat akan tetapi tidak berpengaruh terhadap peningkatan indeks pembangunan manusia diobjek penelitian tahun 2007-2016. Hasil ini sejalan dengan analisis yang dilakukan oleh Kahang yang menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah sector kesehatan tidak signifikan mempengaruhi indeks pembangunan manusia di Kabupaten Kutai Timur. (Kahang, 2016)

Belanja pemerintah bidang kesehatan yang tidak mempengaruhi indeks pembangunan manusia dikarenakan pengeluaran belanja pemerintah bidang kesehatan yang tidak sesuai dengan adanya UU No 36 tahun 2009 yang menyebutkan bahwa besar anggaran kesehatan pemerintah pusat dialokasikan

minimal 5 persen dari APBN di luar gaji, sementara besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi dan Kabupaten/Kota dialokasikan minimal 10 persen dari APBD di luar gaji.

Sudah seharusnya pemerintah Kabupaten Enrekang memikirkan dan mengalokasikan pengeluaran belanja kesehatan pada tingkat yang pantas atau sesuai dengan amanat Undang Undang No 36 Tahun 2009, agar fasilitas dan pelayanan kesehatan dapat dinikmati segala golongan bukan hanya golongan atas saja melainkan juga golongan bawah yang sudah sepatutnya sangat menjadi perhatian pemerintah. Ketika kesehatan masyarakat diperhatikan maka sangatlah mungkin tidak ada lagi masyarakat yang mengalami kekurangan gizi, masyarakat yang sakit dapat berobat walaupun dalam keadaan serba kekurangan. Kesehatan merupakan hal yang penting dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, keadaan tubuh yang sehat masyarakat bisa belajar dan bekerja, maka dengan meningkatnya pendidikan dan kesehatan akan mendorong peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan peningkatan produktivitas tenaga kerja, yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan masyarakat. Dengan demikian diharapkan kondisi ini akan memajukan perekonomian masyarakat dengan bertambahnya kesempatan kerja serta berkurangnya kemiskinan di Kabupaten Enrekang.

Menurut BPS Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2015, sejauh ini 80 persen kelahiran telah ditolong oleh Dokter dan Bidan. Peningkatan setiap tahunnya menjadikan bukti bahwa akses fasilitas kesehatan semakin terjangkau. Namun, akses tersebut masih terasa sulit bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Semakin rendah pendapatan seseorang nampaknya akan semakin rendah pula akses persalinan medis bagi mereka. Inilah salah satu tantangan

yang perlu dikaji oleh pemerintah. Meskipun setiap tahunnya program kesehatan gratis selalu digalakkan oleh pemerintah Sulawesi Selatan. Namun hal itu harus sejalan dengan anggaran yang digulirkan serta perhatian dari pemerintah karena Pemerintah sebagai pemegang kebijakan sudah seharusnya memperhatikan salah satu hal yang mendukung terciptanya pembangunan manusia yakni kesehatan, maka pemerintah dapat memperhatikannya melalui alokasi anggaran pada bidang kesehatan yang tepat sasaran.

3. Pengaruh Belanja Ekonomi terhadap IPM

Temuan penelitian dari hasil estimasi menunjukkan bahwa belanja ekonomi berpengaruh positif namun tidak nyata terhadap indeks pembangunan manusia. Hasil ini menunjukkan bahwa besar belanja pemerintah sector ekonomi ternyata belum berpengaruh secara nyata dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia, berbeda dengan hipotesis dan teori yang menyatakan jika pengeluaran pemerintah di sektor ekonomi meningkat maka akan meningkatkan indeks pembangunan manusia. Ini sejalan dengan analisis yang dilakukan oleh Awardi yang menunjukkan bahwa belanja ekonomi tidak signifikan di Sulawesi Selatan (Awardi, 2015)

Hal ini memperkuat anggapan bahwa belanja ekonomi belum memberikan kontribusi yang meyakinkan terhadap di kabupaten Enrekang. Kinerja perekonomian daerah dan perbaikan kesejahteraan masyarakat . Disamping itu, analisis regresi kelihatannya juga secara tidak langsung mengungkap bahwa pengeluaran atau belanja ekonomi cenderung mendorong kinerja perekonomian melalui kegiatan fisik. Namun, masih sulit untuk membuktikan dampak positif terhadap kesejahteraan (IPM) karena hampir seluruh bidang cenderung merupakan investasi yang dampaknya baru akan

terlihat dalam jangka panjang. Hal ini dikarenakan proporsi belanja ekonomi lebih banyak diberikan kepada belanja barang dan jasa dibandingkan proporsi belanja terhadap kegiatan yang akan berdampak langsung terhadap peningkatan indeks pembangunan manusia.

Sebagian belanja ekonomi cenderung mendorong kinerja perekonomian melalui kegiatan fisik yang hanya berfokus pada daerah perkotaan sehingga tidak menyentuh masyarakat daerah yang sebagian besar tinggal di kampung. Hal ini sejalan dengan teori Model pembangunan tentang pengeluaran pemerintah oleh Rostow dan Musgrave yang menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan antara tahap awal, tahap menengah, dan tahap lanjut. Secara keseluruhan Kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan memiliki beberapa kabupaten yang cenderung merupakan daerah otonom baru atau daerah pemekaran, sehingga pembangunan ekonomi masih berada di tahap awal dan tahap menengah. Maka dari itu, pemerintah baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, Bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Provinsi Sulawesi Selatan, harus bersama-sama mengawal pengimplementasian belanja ekonomi agar tepat sasaran untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dapat tercapai.

Pemerintah daerah di kabupaten Enrekang diharapkan tidak hanya memfokuskan pembangunan di wilayah perkotaan, tetapi memperhatikan juga pembangunan di kampung-kampung agar dapat menyentuh masyarakat Sulawesi Selatan yang sebagian besar tinggal di kampung-kampung. Dimana akses terhadap sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pemberdayaan ekonomi masih sangat minim di kampung-kampung.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Belanja Pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia (IPM), artinya jika belanja pendidikan ditingkatkan maka akan meningkatkan nilai indeks pembangunan manusia (IPM) di kabupaten Enrekang.
2. Belanja Kesehatan berpengaruh positif namun tidak nyata terhadap indeks pembangunan manusia (IPM), artinya besar pengeluaran belanja pemerintah bidang kesehatan ternyata belum berpengaruh secara nyata dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia di kabupaten Enrekang.
3. Belanja Ekonomi berpengaruh positif namun tidak nyata terhadap indeks pembangunan manusia (IPM), artinya besar pengeluaran belanja pemerintah bidang ekonomi ternyata belum berpengaruh secara nyata dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia di kabupaten Enrekang.

B. Saran

Mengacu pada hasil-hasil temuan dalam penelitian ini, maka dipandang perlu untuk memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Dalam pengalokasian belanja daerah diharapkan pemerintah daerah Kabupaten Enrekang memberikan alokasi yang lebih besar dibidang pendidikan untuk kegiatan yang dapat meningkatkan Angka Partisipasi

Sekolah (APS), Angka Melek Huruf (AMH), menurunkan angka putus sekolah, serta peningkatan sarana belajar mengajar yang nantinya dapat meningkatkan IPM.

2. Dalam pengalokasian belanja daerah, diharapkan pemerintah daerah Kabupaten Enrekang dapat memberikan alokasi yang lebih besar dibidang kesehatan & ekonomi untuk kegiatan yang dapat meningkatkan mutu kesehatan masyarakat serta menurunkan angka kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan peningkatan pemberdayaan terhadap kesehatan & ekonomi yang nantinya lebih tepat sasaran sehingga dapat meningkatkan IPM di Kabupaten Enrekang.
3. Bagi peneliti selanjutnya dengan topik yang sejenis disarankan untuk melakukan kajian lebih lanjut dengan memasukkan variabel independen lainnya. Serta memperpanjang periode penelitian, dan menggunakan alat analisis yang lebih akurat untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih mendekati fenomena sesungguhnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Awardi, U.C.S. 2015. *Pengaruh Belanja Pemerintah Terhadap Indeks Pertumbuhan Manusia Di Provinsi Sulawesi Selatan*, Makassar: Febis Universitas Hasanuddin
- A Muhlisani, Nadiyah. 2017. *Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Enrekang*, Makassar: Febis Universitas slam Negeri. (<http://repositori.uin-alauddin.ac.id/8241/1/Nadiyah%20Muhlisani%20A.pdf>. Diakses 11 Mei 2017)
- Badan Pusat Statistik. 2009. *Kabupaten Enrekang Dalam Angka 2008*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Enrekang.Enrekang.
- _____. 2010. *Kabupaten Enrekang Dalam Angka 2009*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Enrekang.Enrekang.
- _____. 2011. *Kabupaten Enrekang Dalam Angka 2010*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Enrekang.Enrekang.
- _____. 2012. *Kabupaten Enrekang Dalam Angka 2011*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Enrekang.Enrekang.
- _____. 2013. *Kabupaten Enrekang Dalam Angka 2012*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Enrekang.Enrekang.
- _____. 2014. *Kabupaten Enrekang Dalam Angka 2013*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Enrekang.Enrekang.
- _____. 2015. *Kabupaten Enrekang Dalam Angka 2014*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Enrekang.Enrekang.
- _____. 2016. *Kabupaten Enrekang Dalam Angka 2015*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Enrekang.Enrekang.
- _____. 2017. *Kabupaten Enrekang Dalam Angka 2016*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Enrekang.Enrekang.
- _____. 2018. *Kabupaten Enrekang Dalam Angka 2017*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Enrekang.Enrekang.
- Dianaputra, I.G.K.A & aswitari, L.P. 2016. *Pengaruh Pembiayaan Pemerintah Di Sector Pendidikan & Kesehatan Terhadap Indicator Kualitas Manusia Serta Pertumbuhan Ekonomi Kab/Kota Provinsi Bali Tahun 2011-2015*. (<https://media.neliti.com/media/publication/165358>. Diakses 22 Januari 2018)
- Indikator Kesejahteraan Kabupaten Enrekang Tahun 2016
- Indeks Pembangunan Manusia Kab.Enrekang Tahun 2014 & 2016

- Kahang, Merang, dkk. 2016. *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Indkes Pembangunan Manusia Di Kabupaten Kutai Timur*. (<http://journal.feb.unmul.ac.id>)
- Marunta A, Ristiyanti. 2017. *Pengaruh Belanja Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2007-2016*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Makassar.
- National Human Development for Balize. 1997.
- Heriyanto, dwi. 2011. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia Kab/Kota Di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2006-2010*. (<https://jurnal.untan.ac.id/index.php/JED2A/article/view/9034>. Diakses 9 November 2017)
- Rakhmawati, rusmarindan. 2016. *Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Tenaga Kerja, Dan Peran Pendidikan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Jawa Tengah*, Surakarta: Febis Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Sanggalorang, Septian M, dkk. 2015. Pengaruh Belanja Pemerintah di Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Sulawesi Utara. *Jurnal: Berkalah Ilmiah Efisiensi* Vo;. 15 No. 02 – Edisi Juli 2015. Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Saptutyingsih, endah & basuki. A.T. 2015. *Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2008-2014*. (<https://ekonometrikblog.files.wordpress.com/>. Diakses 9 November 2017)
- Todaro, Michael, P. dan Stephen C. Smith. 2003. *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga*, Edisi Kedelapan, Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009*, Online Tersedia di: <http://www.depkes.go.id/resources/download/general/UU%20Nomor%2036%20Tahun2%20009%20tentang%20Kesehatan.pdf>.
- UNDP, 1990. *Human Development Report*. 1990. New York: Oxford University Press.
- _____, 2003 . *Human Development Report 2003*. New York: Oxford University Press.
- Wahid A, Bilal. 2012. *Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui Pertumbuhan Ekonomi di Makassar periode 1996-2011*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Makassar.
- Vegirawati, Titin. 2012. *Pengaruh Alokasi Belanja Langsung Terhadap Kualitas Pembangunan Manusia*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Makassar.

L
A
M
P
I
R
A
N

Lampiran 1

a. Hasil estimasi uji Koefisien Determinasi (R^2) menggunakan program

SPSS

Untuk pengaruh X1, X2, dan X3 terhadap Y

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.987(a)	.974	.960	.36405

a Predictors: (Constant), B.Ekonomi (X3), B.Pendidikan (X1), B.Kesehatan (X2)

b. hasil estimasi uji F menggunakan program SPSS

untuk pengaruh X1, X2 dan X3 terhadap Y

ANOVA(b)

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	29.497	3	9.832	89.857	.000(a)
	Residual	.657	6	.109		
	Total	30.153	9			

a Predictors: (Constant), B.Ekonomi (X3), B.Pendidikan (X1), B.Kesehatan (X2)

b Dependent Variable: IPM (Y)

Lampiran 2**Hasil estimasi uji t menggunakan program SPSS****Untuk pengaruh X1,X2,dan X3 terhadap Y****Coefficients(a)**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta	B	Std. Error
1	(Constant)	61.480	.504		122.103	.000
	B.Pendidikan (X1)	1.33E-005	.000	.420	3.103	.021
	B.Kesehatan (X2)	3.08E-005	.000	.331	1.717	.137
	B.Ekonomi (X3)	3.01E-005	.000	.290	1.127	.303

a. Dependent Variable: IPM (Y)

Lampiran 3**Rekapitulasi Variable X1, X2, dan X3 terhadap Y**

Kabupaten/kota	tahun	Belanja pendidikan (jutaan rupiah)	Belanja Kesehatan (jutaan rupiah)	Belanja Ekonomi (jutaan rupiah)	IPM (%)
		(X1)	(X2)	(X3)	(Y)
Enrekang	2007	115.400	55.902	31.600	65.57
	2008	119.675	58.112	35.795	66.01
	2009	120.377	65.703	45.260	66.27
	2010	146.265	47.757	39.889	66.27
	2011	218.096	56.781	47.800	67.03
	2012	198.598	57.817	46.800	67.74
	2013	217.857	77.724	51.270	68.39
	2014	225.898	85.200	65.877	69.37
	2015	245.786	98.588	75.339	70.03
	2016	270.966	104.778	85.889	70.79

BIOGRAFI PENULIS



Siska Purnama Sari panggilan Icha lahir di Rano pada tanggal 25 Agustus 1994 dari pasangan suami istri Bapak Hamzah Rangin dan Ibu Ramlah. Peneliti adalah anak ketujuh dari sebelas bersaudara. Peneliti sekarang bertempat tinggal di Rano Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang. Pendidikan yang telah ditempuh oleh peneliti yaitu SD Negeri 98 Tongko lulus tahun 2006, SMP Negeri 2 Alla lulus tahun 2009, SMA Negeri 1 Alla lulus tahun 2012, dan mulai tahun 2014 mengikuti Program S1 Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan Kampus Unismuh Makassar Sampai sekarang. Sampai dengan penulisan skripsi ini peneliti masih terdaftar sebagai mahasiswa Program S1 Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan Universitas Muhammadiyah Makassar (UNISMUH).